

**PENGARUH IMPLEMENTASI *E – PROCUREMENT*
TERHADAP *FRAUD* PENGADAAN BARANG DAN
JASA DALAM MEWUJUDKAN
GOOD GONVERNANCE
(Study pada Pemkab Lamongan)**

SKRIPSI



Oleh :

WIWIK AMELIA

NIM : 1701011571

**PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN FAKULTAS TEKNIK DAN BISNIS
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN
LAMONGAN
2021**

**PENGARUH IMPLEMENTASI *E – PROCUREMENT*
TERHADAP *FRAUD* PENGADAAN BARANG DAN
JASA DALAM MEWUJUDKAN
*GOOD GONVERNANCE***

(Study pada Pemkab Lamongan)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Manajemen
(S.M) pada Program Studi S1 Manajemen



Oleh :

WIWIK AMELIA

NIM : 1701011571

**PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN
FAKULTAS TEKNIS DAN BISNIS
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN
LAMONGAN**

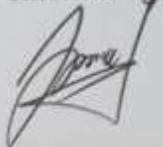
2021

LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : WIWIK AMELIA
NIM : 1701011571
JUDUL : PENGARUH IMPLEMENTASI
E-PROCUREMENT TERHADAP *FRAUD*
PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM
MEWUJUDKAN *GOOD GONVERNANCE* (Studi
pada Pemkab Lamongan).

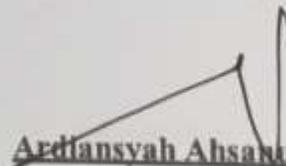
Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan dihadapan Dewan Penguji
Skripsi
pada tanggal 05 April 2021

Pembimbing I,



Umar Yeni Suyanto, S.Pd, M.Pd, MM
NIDN. 0725109301

Pembimbing II,



Ardiansyah Ahsanul H, SE, M.Pd
NIDN. 0711058602

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : WIWIK AMELIA
NIM : 1701011571
JUDUL : PENGARUH IMPLEMENTASI
E-PROCUREMENT TERHADAP *FRAUD*
PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM
MEWUJUDKAN *GOOD GONVERNANCE* (Studi
pada Pemkab Lamongan).

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal
05 April 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

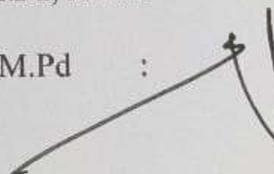
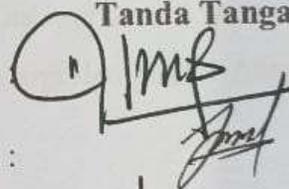
Susunan Dewan Penguji:

Ketua : Darianto, SE., M.M

Penguji : Umar Yeni Suyanto, S.Pd, M.Pd, MM :

Ardiansyah Ahsanul H, SE, M.Pd :

Tanda Tangan:

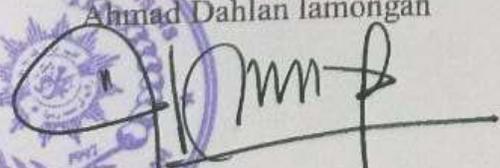
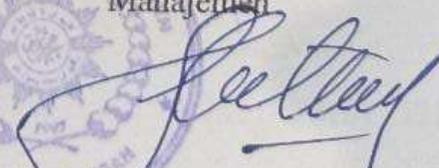


Mengesahkan,

Mengetahui,

Dekan Fakultas Teknik dan Bisnis
Institut Teknologi dan Bisnis
Ahmad Dahlan Lamongan

Ketua Program Studi
Manajemen



Darianto, SE., M.M
NIDN. 0719117702

Muhammad Sulthon, SM, MM.
NIDN. 0704019501

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : WIWIK AMELIA

NIM : 1701011571

Program Studi : Manajemen

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa **Skripsi** yang berjudul Pengaruh implementasi *E-procurement* terhadap *Fraud* pengadaan barang dan jasa dalam mewujudkan *good governance* adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan.

Lamongan, 19 Februari 2021

Yang Membuat Pernyataan



wik Amelia

NIM : 1701011571

MOTTO

Seseorang bertindak tanpa ilmu ibarat bepergian tanpa petunjuk.
Dan sudah banyak yang tahu kalau orang seperti itu kiranya akan hancur,
bukan selamat. (*Hasan Al Bashri*)



Nilai akhir dari proses pendidikan, sejatinya terekapitulasi dari keberhasilannya
menciptakan perubahan pada dirinya dan lingkungan.

Itulah fungsi daripada pendidikan yang sesungguhnya. (*Lenang Manggala*)



Dunia itu ibarat bayangan, bila kau kejar, dia akan lari darimu.

Tapi bila kau palingkan badanmu, dia tak punya pilihan lain kecuali mengikutimu

(*Ibnul Qoyyim Al-Jauziah*)

ABSTRAK

Wiwik Amelia, 2021. Pengaruh Implementasi *E-Procurement* terhadap *Fraud* Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Mewujudkan *Good Governance* (Studi pada Pemkab Lamongan). Skripsi, Program Studi S1 Manajemen. Program Sarjana Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan.

Pembimbing : (1) Umar Yeni Suyanto, S.Pd, M.Pd, MM 2. Ardiansyah Ahsanul H, SE, M.Pd

Penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh *E-Procurement* terhadap *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa dalam Mewujudkan *Good Governance*, Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Lamongan yang merupakan pengguna aplikasi LPSE. Karakteristik responden dari penelitian ini yaitu penyedia/peserta tender tahun 2020 di Pemkab Lamongan dan merupakan pengguna *e-procurement* yang berjumlah 889 Responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui Kuesioner secara langsung. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode Penelitian analisis statistik yaitu analisis jalur (Path Analysis) . penelitian dan analisis yang peneliti olah dengan menggunakan alat bantuan program SPSS 24 For Windows.

Hasil penelitian menunjukan bahwa *E-Procurement* berpengaruh terhadap *Fraud* pengadaan Barang dan Jasa dalam mewujudkan *Good Governance*.

Kata Kunci : Kuantitas, Kualitas, dan Ketepatan waktu

ABSTRACT

Wiwik Amelia, 2021. The Effect of E-Procurement Implementation on Fraud Procurement of Goods and Services in Realizing Good Governance (Study on Lamongan Regency Government). Thesis, S1 Management Study Program. Undergraduate Program of the Ahmad Dahlan Institute of Technology and Business Lamongan.

Supervisor : (1) Umar Yeni Suyanto, S.Pd, M.Pd, MM 2. Ardiansyah Ahsanul H, SE, M.Pd

This research aims to examine how much influence E-Procurement has on Fraud Procurement of Goods and Services in Realizing Good Governance. This research is a quantitative research with a descriptive approach. The population in this study are all actors in the procurement of goods and services in Lamongan Regency who are users of the LPSE application. The characteristics of the respondents in this study are the providers/participants of the 2020 tender in the Lamongan Regency Government and are e-procurement users, totaling 889 respondents. The data used in this research is primary data collected through direct questionnaires. The sampling technique used was statistical analysis research method, namely path analysis. the research and analysis that the researcher carried out using the SPSS 24 For Windows program assistance tool.

The results of the research show that E-Procurement has an effect on the procurement of goods and services fraud in realizing Good Governance.

Keywords: Quantity, Quality, and Timeliness

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi berjudul **Pengaruh Implementasi *E-procurement* terhadap *Fraud* pengadaan barang dan jasa dalam mewujudkan *good governance*** (Study pada Pemkab Lamongan). Tujuan dari penulisan proposal skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Manajemen pada Program Studi S1 Manajemen ITB Ahmad Dahlan Lamongan.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Hj. Mu'ah, M.M., M.Pd., selaku Rektor ITB Ahmad Dahlan Lamongan yang telah memberikan kesempatan penulis untuk belajar di Program Studi S1 Manajemen ITB Ahmad Dahlan Lamongan.
2. Darianto., SE., M.M., selaku Dekan Fakultas Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan.
3. Muhammad Sulton, S.M., M.M., selaku Ketua Program Studi S1 Manajemen ITB Ahmad Dahlan Lamongan.
4. Umar Yeni Suyanto, S.Pd, M.Pd, MM selaku Dosen Pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini hingga selesai.
5. Ardiansyah Ahsanul H, SE, M.Pd_ selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini hingga selesai
6. Bapak Ibu Dosen Program Studi S1 Manajemen yang telah mendidik dan memberikan pengetahuan berguna selama studi dan motivasi untuk menyelesaikan proposal skripsi ini.
7. Segenap tenaga kependidikan ITB Ahmad Dahlan Lamongan.

8. Para responden yang telah memberikan bantuan data dan informasi selama pelaksanaan penelitian di lapangan.
9. Keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan secara moril dan materil. Terhusus untk Yak Ipe yang selalu merestui dan memberikan support dan Semangat.
10. Para teman-teman angkatan 2017 yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
11. Pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan proposal skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Lamongan, 19 Februari 2021

Penulis,

Wiwik Amelia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SAMPUL DALAM.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
MOTTO	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
2.1.1 Sistem Informasi Manajemen	11
2.1.2 E-Procurement.....	13
2.1.3 Fraud.....	19
2.1.4 <i>Good Governance</i>	23
2.1.5 Penelitian Terdahulu	27
2.1.6 Kerangka Berfikir.....	36
2.1.7 Konsep Hipotesis.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1 Jenis Penelitian.....	42
3.2 Lokasi Penelitian	42
3.3 Populasi dan Sampel	43
3.3.1 Populasi.....	43

3.3.2	Sampel.....	43
3.4	Sumber Data.....	44
3.5	Metode Pengumpulan Data	45
3.6	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	47
3.6.1	Variabel Penelitian.....	47
3.6.2	Definisi Operasional	47
3.7	Teknik Analisis Data.....	49
3.7.1	Uji Validitas	49
3.7.2	Uji Reliabilitas	50
3.7.3	Uji Asumsi Klasik.....	51
3.7.4	Uji Regresi Sederhana.....	53
3.7.5	Uji analisis jalur/ path.....	54
3.7.6	Uji Sobel	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		57
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	57
4.2	Deskripsi Karakteristik Responden.....	66
4.3.1	E-Procurement (X1).....	69
4.3.2	<i>Fraud</i> (Y1).....	71
4.3.3	Good Governance (Y2).....	72
4.4	Hasil Analisis Data.....	74
4.5	Pembahasan	87
1.	Pengaruh <i>E-Procurement</i> (X) terhadap <i>Fraud</i>	87
2.	Pengaruh <i>E-Procurement</i> (X) terhadap <i>Good Governance</i> (Y ₂)	89
3.	Pengaruh <i>Fraud</i> (Y ₁) terhadap <i>Good Governance</i> (Y ₂).....	91
4.	Pengaruh <i>E-Procurement</i> (X) terhadap <i>Good Governance</i> (Y ₂) Melalui <i>Fraud</i> (Y ₁) ..	92
4.6	Implikasi Hasil Penelitian	94
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		96
5.1	Kesimpulan.....	96
5.2	Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA		98
Lampiran		98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 E-Procurement Management.....	14
Gambar 2. 2 Kerangka Berfikir	36
Gambar 4. 1 Logo Pemkab Lamongan	57
Gambar 4. 2 Hasil Uji Normalitas	76
Gambar 4. 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	78

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	27
Tabel 3. 1 Skala Likert.....	46
Tabel 3. 2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	47
Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	67
Tabel 4. 2 Karakteristik responden berdasarkan usia	67
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden berdasarkan Lama usaha	68
Tabel 4. 4 Karakteristik responden berdasarkan omset tahunan.....	68
Tabel 4. 5 Tanggapan Responden.....	69
Tabel 4. 6 Tanggapan dan Penilaian Responden tentang E-procurement	70
Tabel 4. 7 Tanggapan dan Penilaian Responden tentang <i>Fraud</i>	71
Tabel 4. 8 Tanggapan dan Penilaian Responden tentang <i>Good Governance</i>	72
Tabel 4. 9 Rekapitulasi hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian	74
Tabel 4. 10 Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian	75
Tabel 4. 11 Hasil Uji Multikolinieritas	77
Tabel 4. 12 Hasil Koefisien Regresi Sederhana (Uji t).....	79
Tabel 4. 13 Koefisien Determinasi (R^2).....	80
Tabel 4. 14 Rekapitulasi Analisis antara X terhadap Y_1	82
Tabel 4. 15 Rekapitulasi Analisis antara X dan Y_1 terhadap Y_2	83
Tabel 4. 16 Hasil Uji Pengaruh Variabel Mediasi	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan komponen fundamental dari tata kelola pemerintahan yang baik. Pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki tujuan antara lain untuk memperoleh barang dan jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan dengan jumlah dan mutu yang sesuai dan tepat pada waktunya (tepat jumlah, tepat mutu dan tepat waktu).

Dalam pasal 1 angka 1 Perpres 54 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015, dinyatakan bahwa: “ pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa”.

Menurut data yang dinyatakan oleh *Indonesia Procurement Watch* (IPW) menyatakan bahwa, dari 385 kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 70 persen diantaranya merupakan kasus pengadaan barang dan jasa LKPP (2010, h. 19) menyebutkan 3 (tiga) kelemahan yang ada dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah selama ini, yaitu: terkait transparansi, inefisiensi, dan ketidak sesuaian fungsi pengadaan.

Pengadaan menjadi salah satu penyumbang terbesar tindak pidana korupsi dalam sektor keuangan publik. Kegagalan sistem tersebut mengindikasikan terdapat

kesalahan dalam sistem akuntansi dan adanya konflik kepentingan dalam badan organisasi. Sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah dianggap menjadi sumber utama kebocoran anggaran, dimana penggunaan sistem konvensional memungkinkan korupsi dan kolusi yang mengakibatkan kemerosotan besar dalam pelayanan jasa publik. Melihat hal tersebut, kiranya memang di perlukan suatu penelitian mendalam terkait faktor-faktor apa saja yang berpengaruh, sehingga kecurangan pada kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah mampu di tekan.

Permasalahan umum dalam pengadaan barang dan jasa yang timbul sebagai dampak atas era globalisasi dan proses demokratisasi dalam pengadaan barang dan jasa adalah *Inefisiensi*, artinya pengadaan barang dan jasa selama ini masih belum menghasilkan harga yang kompetitif. Harga barang dan jasa yang diperoleh melalui proses pengadaan barang dan jasa lebih cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan pembelian langsung/harga pasar. Permasalahan selanjutnya lemahnya daya saing nasional, artinya pelaksanaan pengadaan yang tidak efisien dan iklim usaha yang tidak sehat (adanya unsur korupsi, kolusi dan nepotisme) sehingga menimbulkan ekonomi biaya yang lebih tinggi sehingga harga tidak kompetitif dan menyebabkan belanja publik tidak mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Permasalahan yang terakhir adalah pendekatan yang protektif artinya, banyaknya pembatasan dalam keikutsertaan dunia usaha seperti penggolongan usaha (besar, menengah dan kecil). Pendekatan ini tidak mendapatkan sumbangan yang berarti bagi peningkatan daya saing nasional dan tumbuh kembangnya usaha (Adrian, 2016:7).

E-Procurement adalah sebuah sistem lelang dalam pengadaan barang dan jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet.

Dengan *E-Procurement proses* lelang dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil/ tidak diskriminatif dan akuntabel sehingga diharapkan dapat mencerminkan keterbukaan / transparansi dan juga meminimalisir praktik curang KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dalam lelang pengadaan barang yang dapat merugikan keuangan negara (Andrian, 2016:254). *E-Procurement* pada dasarnya mengubah pola pelaksanaan yang manual dan rawan pelanggaran menjadi sistem elektronik yang sistemik dengan mengurangi tatap muka, sehingga dengan otomatis peluang untuk adanya penyelewengan berkurang. Terdapat lima tema utama yang menjadi dasar implementasi *E-Procurement* meliputi: perubahan dalam total biaya perolehan, perubahan terhadap karakteristik organisasi, perubahan struktur pemerintahan, sistem spesifikasi, dan pelaksanaan manajemen. Dimana kelima tema tersebut saling berhubungan dan terintegrasi satu dengan yang lainnya.

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu Daerah yang menerapkan sistem *E-Procurement* dalam proses pengadaan barang dan jasa. Sebagai organisasi publik Pemerintah Kabupaten Lamongan memiliki fungsi untuk memberikan layanan dan pemenuhan kebutuhan publik yang salah satunya melalui pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Implementasi *E-Procurement* di Kabupaten Lamongan berawal dengan mulai dirintisnya LPSE pada tahun 2010 yang sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa. Maka tiap satuan kerja yang berada dibawah Pemerintah Kabupaten Lamongan harus melaksanakan proses kegiatan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*E-Procurement*) dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini di dukung dengan

pernyataan bupati Lamongan yang antusias dengan diselenggarakannya *E-Procurement* dapat menyelesaikan masalah efektifitas yang timbul dalam proses pengadaan barang dan jasa selama ini.

Menurut Abdul (2016:130) efektifitas adalah ukuran hasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah program atau kegiatan telah mencapai kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran efektifitas atau tidak penerapan sistem *E-Procurement* di sebuah instansi pemerintah dapat dilihat dari ukuran tujuan yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah pada pasal 107 yaitu terdiri dari: Indikator meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, Indikator meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, Indikator memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan. Indikator mendukung proses monitoring dan audit dan Indikator memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

fraud adalah tindakan melawan hukum yang merugikan entitas/organisasi dan menguntungkan pelakunya (Karyono, 2013: 4). Bentuk kecurangan/ *fraud* yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan dari berbagai kecurangan, seperti yang dijelaskan oleh yaitu diantaranya kecurangan laporan (*fraudulent statement*) yang terdiri atas kecurangan laporan keuangan (*financial statement*) dan kecurangan laporan lain (*non financial statement*). Penyalahgunaan aset (*aset misappropriation*) yang terdiri atas kecurangan (*cash*) dan kecurangan persediaan dan aset lainnya (*inventory and other assets*). Korupsi (*corruption*) terdiri atas pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), hadiah

tidak sah (*illegal gratuities*) dan pemerasan ekonomi (*economic extortion*), dan kecurangan yang berkaitan dengan komputer. Namun banyak juga kecurangan yang belum diketahui oleh publik, selain yang telah dipaparkan ada juga kecurangan mengenai aset atau pengadaan barang dan jasa (Karyono 2013:11).

Fraud juga dapat dicegah dengan adanya *Whistleblowing System*. *Whistleblowing System* merupakan sebuah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja. Indonesia sebagai negara di benua asia merupakan negara dengan budaya kolektif yaitu kehidupan sosial menjadi lebih dominan dalam keseharian dibandingkan dengan kehidupan pribadi. Kondisi budaya yang seperti ini menjadikan *Whistleblower System* menjadi lebih sulit diterapkan di indonesia. Padahal *Whistleblowing System* yang efektif akan mendorong partisipasi masyarakat dan karyawan perusahaan untuk lebih berani bertindak dalam mencegah terjadinya kecurangan dan korupsi dengan melaporkannya ke pihak yang dapat menanganinya. Sehingga dengan adanya *Whistleblowing System* ini maka lebih dapat meningkatkan kejujuran dan keterbukaan.

Selain itu *Good Corporate Governance* nampaknya juga berpengaruh dalam mencegah terjadinya *fraud*. Praktik yang tidak sehat dalam tata kelola perusahaan memungkinkan terjadi *fraud* yang sulit terdeteksi oleh pihak pemangku kepentingan. *Corporate Governance* merupakan alat untuk menjamin direksi dan manjer (*insider*) agar bertindak yang terbaik untuk kepentingan investor luar (*kreditur atau shareholder*) (Jackson, 2009). Badan pengelola pasar modal di

banyak negara menyatakan penerapan tata kelola perusahaan di perusahaan-perusahaan publik secara baik telah mencegah praktik kecurangan atas laporan keuangan kepada pihak yang berkepentingan (Sutoyo dan Aldridge, 2005). *Fraud* juga dapat dicegah jika suatu organisasi memiliki budaya etis. Budaya etis organisasi merupakan suatu pola tingkah laku, kepercayaan yang telah menjadi suatu panutan bagi semua anggota organisasi. Tingkah laku merupakan suatu tingkah laku yang dapat diterima oleh moral dan benar secara hukum. Di dalam suatu budaya organisasi yang etis terdapat adanya suatu komitmen dan lingkungan yang etis pula (Pristiyanti, 2012). Jika suatu organisasi mempunyai budaya etis organisasi yang rendah maka akan mendorong karyawannya untuk melakukan tindakan *fraud* atau kecurangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik budaya etis organisasi suatu instansi akan semakin rendah kecenderungan karyawan melakukan *fraud* atau kecurangan.

Berdasarkan uraian masalah di atas dapat diidentifikasi bahwa *fraud* terjadi karena lemahnya pengendalian internal dalam suatu perusahaan meskipun perusahaan tersebut telah memiliki standar dan peraturan, banyak perusahaan yang belum menerapkan konsep *Corporate Governance* sehingga perusahaan tersebut tidak berjalan sesuai dengan harapan para *stakeholder*. Masih rendahnya moral yang dimiliki masyarakat dalam kehidupan sosial menyebabkan banyak terjadi perilaku yang menyimpang seperti praktik-praktik yang koruptif. Disisi lain mayoritas masyarakat bersikap tidak peduli bahkan mendukung *fraud* karena ketidakpedulian tersebut mencul pada tindakan negosiasi dengan memberikan sejumlah imbalan tertentu.

Good Governance dapat diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Sementara itu mendefinisikan *Good Governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi, dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Muindro, 2008:19).

Berdasarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 menimbang bahwa kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang sangat pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan penggunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*Good governance*) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan *E-Government*. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintah (*E-Government*) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.

Salah satu bentuk penyelenggaraan *E-Government* untuk mencapai *Good Governance* adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (*E-Procurement*). Banyaknya proses pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan tersembunyi atau berpura-pura melakukan proses transparan dengan pengaturan orang dalam, padahal sebenarnya jelas-jelas merupakan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), untuk mengatasi hal tersebut tentulah diperlukan proses yang terbuka melalui *E-Procurement* atau proses pengadaan barang dan jasa secara

online melalui internet yang akan mendapatkan pengawasan dari masyarakat (Andrian, 2016:253). Proses tender proyek di berbagai daerah seringkali dirasakan tidak adil dan tidak transparan oleh sebagian pengusaha karena yang mendapatkan proyek biasanya adalah mereka yang mempunyai hubungan dekat dengan penguasa (Agus, 2008:164).

Sesuai dengan tujuan dilaksanakannya *E-Procurement* sebagai upaya meminimalisir *fraud* pengadaan barang dan jasa pemerintah dan mendukung terlaksananya tata kelola pemerintah yang baik, maka komitmen dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan menjadi prasyarat utama. Hal ini mendorong pejabat yang berwenang pada pengadaan barang dan jasa untuk taat pada peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian skripsi ini berjudul “Pengaruh Implementasi E-Procurement terhadap pengadaan barang dan jasa dalam mewujudkan Good Governance (Studi Pemkab Lamongan)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang diteliti adalah :

1. Apakah terdapat Pengaruh *E-procurement* terhadap *Fraud* ?
2. Apakah terdapat pengaruh *Fraud* terhadap *good governance* ?
3. Apakah terdapat pengaruh *E-procurement* terhadap *Fraud* melalui *good governance* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Pengaruh *E- procurement* terhadap *Fraud*
2. Pengaruh *Fraud* terhadap *good governance*
3. Pengaruh *E- procurement* terhadap *Fraud* melalui *good governance*

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyempurnakan Stewardship Theory, dimana pionir dari teori tersebut adalah Donaldson dan Davis (1991:50). Teori ini menggambarkan situasi dimana paramanajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Maksud penerapan stewardship theory ini adalah agar kepentingan personal antara pemerintah dengan masyarakat dapat diselaraskan melalui pencapaian tujuan organisasi dan apabila terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan masyarakat, maka pemerintah akan menjunjung tinggi nilai kebersamaan sehingga tujuan organisasi tercapai dan tidak ada kecurangan/fraud yang akan terjadi.

1.4.2 Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemerintah dan pihak manajemen dalam mencegah atau meminimalisir terjadinya *fraud* demi terwujudnya *good governance* pada proses

pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan dengan transparan dan akuntabel serta diharapkan dapat menjadi salah satu sumber bahan pertimbangan yang berguna dalam memperbaiki sistem pengawasan dan pengendalian dalam proses pengadaan barang/jasa.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Dalam organisasi banyak kita lihat manfaat suatu sistem informasi bila digunakan sebaik mungkin. Peranan manajemenlah yang menuntut penyebaran dan penggunaan sumber-sumber yang efisien untuk mencapai suatu tujuan, dengan demikian akan membantu fungsi manajemen dengan diterimanya suatu informasi dengan cepat dan tepat. Maka diperlukan sistem informasi manajemen yang baik untuk mendukung tujuan organisasi. Dalam suatu perusahaan tidak akan terlepas dari berbagai macam masalah yang ada didalam organisasi, dan didalam suatu perusahaan perubahan sering sekali timbul, sehingga perubahan ini sering sekali menjadi hambatan bagi manajer, maka akibatnya dari perubahan ini menimbulkan masalah. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem informasi manajemen untuk mendukung manajer dalam mengatasi masalah-masalah tersebut.

Sistem informasi tidak hanya memproses data menjadi informasi tetapi juga menyalurkan informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan. AR Farizky (2016) Definisi sistem informasi adalah sebuah sistem yang terintegrasi antara sistem manusia dan mesin, untuk menyediakan informasi untuk mendukung operasi manajemen dalam suatu organisasi. Sistem ini memanfaatkan perangkat keras dan perangkat lunak komputer, prosedur manual, model manajemen dan basis data. Berbasis komputer dan sistem manusia dan mesin, berbasis komputer adalah perancang harus memahami pengetahuan komputer dan pemrosesan informasi. Sistem manusia mesin adalah adanya interaksi antara

manusia sebagai pengelola dan mesin sebagai alat untuk memproses informasi. Ada proses manual yang harus dilakukan manusia dan ada proses yang terotomasi oleh mesin. Oleh karena itu diperlukan suatu prosedur atau manual sistem. Sutiyadi (2017) menyatakan bahwa, sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem manusia/mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi manajemen dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi.

McLeod dan Schell dalam Sutiyadi (2017) dalam bukunya yang berjudul *Management Information System* mendefinisikan bahwa “sistem informasi manajemen sebagai suatu sistem berbasis komputer yang membuat informasi bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. Menurut McLeod (2001, p17) sistem informasi manajemen adalah suatu sistem penghasil informasi yang mendukung sekelompok manajer yang mewakili suatu unit organisasi seperti suatu tingkat manajemen atau suatu bidang fungsional. Menurut O’Brien (2003, p26) sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem yang menyediakan informasi dalam bentuk laporan dan gambaran untuk diberikan kepada manajer dan para profesional misalnya analisa penjualan, kinerja produksi, sistem laporan biaya.

Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan dapat disimpulkan sistem informasi manajemen adalah seperangkat prosedur gabungan yang mengumpulkan dan menghasilkan data yang andal, relevan, dan terorganisir dengan baik yang mendukung proses pengambilan keputusan suatu organisasi. Singkatnya, ini adalah sekelompok proses dimana data diperoleh, dianalisa dan ditampilkan dengan cara yang berguna untuk tujuan pengambilan keputusan.

2.1.2 E-Procurement

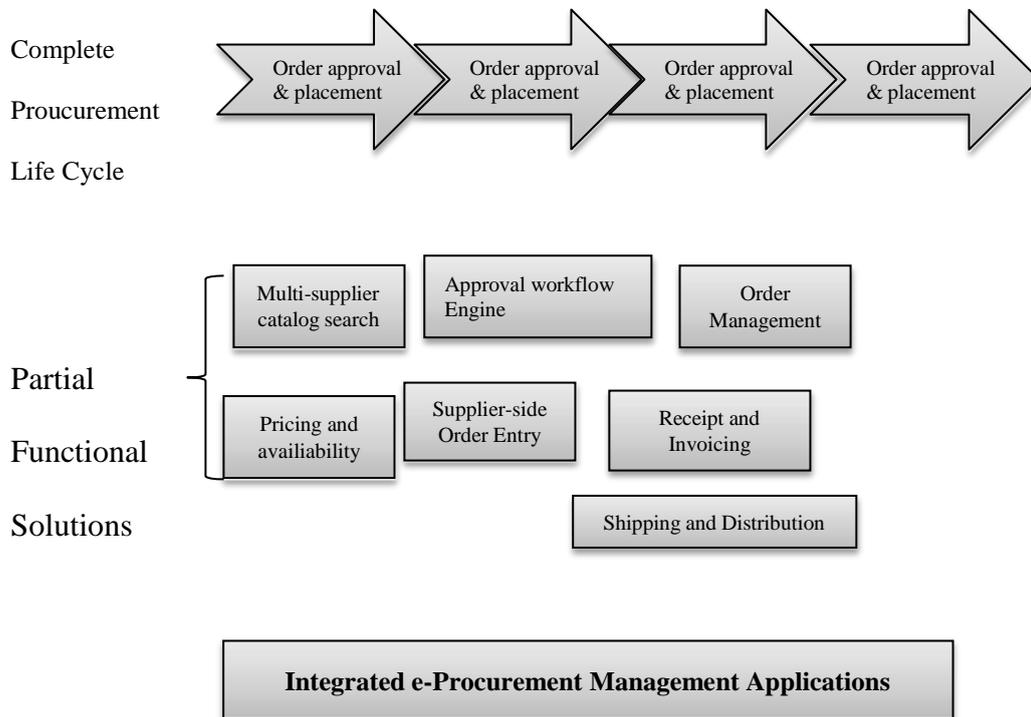
a. Pengertian *E-Procurement*

E-Procurement merupakan sistem pengadaan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik seperti internet atau jaringan komputer. *E-Procurement* diterapkan dalam proses pembelian dan penjualan secara online supaya lebih efisien dan efektif. *E-Procurement* mengurangi proses-proses yang tidak diperlukan dalam sebuah proses bisnis. Dalam prakteknya, *E-Procurement* mengurangi penggunaan kertas, menghemat waktu dan mengurangi penggunaan tenaga kerja dalam prosesnya.

Menurut Kalakota et al (2001), *Procurement* adalah semua aktivitas yang melibatkan aktivitas mendapatkan barang meliputi pembelian, juga kegiatan logistic ke dalam seperti, transportasi barang masuk dan penyimpanan di gudang sebelum barang tersebut digunakan. *Procurement* atau pengadaan barang tidak hanya terbatas pada aktivitas purchasing atau pembelian yang selama ini dipandang oleh sebagian banyak orang. Kalakota menyebutkan *E-Procurement* merupakan proses pengadaan barang atau lelang dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam bentuk website. Sedangkan Chaffey (2007) *E-Procurement* adalah merupakan integrasi dan manajemen elektronik terhadap semua aktivitas pengadaan termasuk permintaan pembelian, pemberin hak, pemesanan, pengantaran dan pembayaran antara pembeli dengan pemasok.

Menurut Neef Dale (2001), *E-Procurement* adalah aplilasi sistem informasi untuk mengkoordinasikan proses pembelian pengiriman, pengelolaan inventory, pemilihan supplier, dan proses persetujuan dari bisnis penting dengan organisasi yang berkaitan dengan memanfaatkan internet atau intranet. *E-Procurement* menjadi alat bantu efektif untuk mengurangi korupsi. Kalakota menggambarkan

Manajemen *E-Procurement* melalui diagram sebagai berikut:



Interenterprise Processes Breaking Down Process Wall

Gambar 2. 1 E-Procurement Management

Situs web *E-Procurement* memungkinkan penggunaan yang memenuhi syarat dan telah mendaftar untuk menjadi pembeli atau penjual barang atau jasa. Bergantung pada pendekatan, pembeli atau penjual dapat menentukan harga atau mengajukan penawaran. Saat pelanggan mengajukan penawaran, pelanggan dapat mengkuualifikasikan jumlah diskon atau penawaran khusus yang ditawarkan. *E-Procurement* diharapkan dapat terintegrasi dengan trend komputer mendatang, yaitu manajemen rantai pasokan (*Supply Chain Management*) Djoyosoekarto (2008:10) mengidentifikasi *E-Procurement* sebagai: pengadopsian sistem berbasis internet dalam proses pembelian. Menurut Willem (2012:80) *E-Procurement*, yaitu: “Pengadaan secara elektronik (*E-Procurement*) merupakan

pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan jaringan elektronik (jaringan internet atau intranet) atau *electronic data interchange (EDI)*” Menurut Sutedi (2012:254), yaitu: “*E-procurement* sebagai sebuah website yang merupakan sistem lelang dalam pengadaan barang oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet.” Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa: “Pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.” Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa *E-Procurement* mengacu pada pemanfaatan internet berdasarkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk membantu individu dan keseluruhan tingkatan proses pengadaan barang dan jasa.

b. Ruang Lingkup

Sistem pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk salah satu kegiatan yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, melalui sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*E-Procurement*). Sistem ini memungkinkan para penyedia jasa untuk mendapatkan data dan informasi secara cepat dan akurat tentang keberadaan proyek-proyek pemerintah, Serta akan terkoneksi (online) dengan para panitia pengadaan saat mengikuti proses lelang. Sebuah terobosan menuju efisiensi, efektivitas, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, serta akuntabel, sebagaimana yang dituntut oleh Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahan-perubahannya. Bagi para pengusaha bisnis jasa pelaksana konstruksi sendiri, *E-Procurement* akan mengiringi perusahaan

menjadi lebih mandiri dan profesional. Di samping itu, sistem *E-Procurement* diharapkan akan mempercepat arus transfer data dan memperluas jaringan informasi elektronik ke seluruh wilayah Indonesia.

Pengadaan barang/jasa secara elektronik atau *E-Procurement* adalah sistem pengadaan barang/jasa yang proses pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi. Sistem aplikasi serta layanan pengadaan elektronik disediakan oleh LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Nasional yang bertindak sebagai koordinator. Ruang lingkup *E-Procurement* meliputi e-Lelang Umum (*e-Regular Tendering*), e-Lelang Penerimaan (*e-Reverse Tender*), e-Pembelian (*e-Purchasing*), e-Penawaran Berulang (*e-Reverse Auction*) dan e-Seleksi (*e-Selection*). Metode pemilihan penyediaan barang/jasa secara elektronik yang sudah digunakan saat ini adalah e-Lelang Umum. Metode pemilihan lainnya akan diterapkan secara bertahap sesuai dengan pengembangan sistem dan aplikasi pengadaan secara elektronik serta kerangka hukum yang memayunginya.

E-Lelang Umum adalah pelelangan umum yang dilaksanakan untuk mendapatkan barang/jasa. Tujuannya adalah untuk mendapatkan penyediaan jasa dengan harga penawaran terendah tanpa mengabaikan kualitas dan sasaran yang telah ditetapkan. Salah satu unsur penting dalam *E-Procurement* adalah lintas pertukaran dokumen. Karena sifatnya adalah data elektronik, maka lintas data tentu saja mempergunakan media elektronik berbasis web/internet. Untuk menjamin keamanan dokumen penawaran yang dikirim oleh peserta pengadaan, telah dipersiapkan aplikasi pengaman dokumen (Apendo) yang digunakan untuk melakukan enkripsi dan dekripsi dokumen.

c. **Indikator**

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana proses alur lelang dalam Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik, bagaimana efektivitas SPSE, dan faktor pendukung dan penghambat keberhasilan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Teknik penentuan informan, dengan menggunakan key informan. Proses analisis data dilakukan dengan mengelompokkan serta mengkombinasikan informasi yang diperoleh, dan juga menetapkan serangkaian hubungan keterkaitan antara informasi tersebut. Sedangkan validitas data diuji melalui triangulasi sumber data sehingga data yang disajikan merupakan data yang absah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Lamongan merupakan salah satu Daerah yang telah melakukan proses lelang yang lebih baik dengan menggunakan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik. Walaupun ada beberapa indikator yang menjadi penghambat keberhasilan SPSE, namun secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa seluruh indikator tersebut mendukung keberhasilan program SPSE. Indikator yang digunakan dalam mengukur Efektivitas Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik adalah indikator kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu.

1. Kuantitas

Berdasarkan hasil diketahui bahwa minimnya keluhan dari penyedia jasa menjadikan LPSE sebagai program yang dikatakan berhasil dan efektif secara kuantitas. Apabila ditemukan keluhan pada penggunaan SPSE maka panitia harus cepat merespon keluhan tersebut agar tidak menjadi masalah di

kemudian hari. hampir semua informan dari kalangan penyedia jasa kontraktor yang ada tidak pernah memiliki keluhan berarti. Apabila ada keluhan dari penyedia jasa, maka panitia segera merespon keluhan tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak ada masalah dikemudian hari. Peran panitia pengadaan sangatlah penting sebab harus siap mengantisipasi setiap kendala yang ada agar program berjalan secara efektif. mulai dari terbentuknya LPSE, penyedia jasa sudah siap mengantisipasi proses lelang dengan sistem secara elektronik tersebut. Maka pengadaan barang/jasa baik secara elektronik maupun manual tidak pernah mengalami penurunan setiap tahunnya.

2. Kualitas

Berdasarkan hasil diketahui bahwa sampai saat ini panitia pengadaan belum pernah menemukan adanya keluhan seputar penggunaan SPSE, namun keluhan lisan sempat diterima oleh panitia pengadaan seputar sulitnya akses jaringan internet. Hal tersebut bukan merupakan suatu penghambat kurang efektifnya program SPSE, karena masalah yang diterima terkait akses internet yang digunakan merupakan wilayah provider penyedia jasa internet, jadi bukan merupakan suatu masalah yang ada pada LPSE.

3. Ketepatan Waktu

Berdasarkan hasil diketahui bahwa, penyedia jasa belum pernah melakukan keterlambatan dalam memasukan dokumen penawaran, namun perbandingannya cukup besar antara jumlah yang mendaftar dengan jumlah yang memasukan dokumen penawaran. Jumlah penyedia jasa yang mendaftar lebih besar dibandingkan dengan jumlah penyedia jasa yang memasukan dokumen penawaran.

2.1.3 Fraud

a. Definisi *Fraud* (Kecurangan)

Fraud menurut Pusdiklatwas BPKP (2002) adalah sebagai berikut, "*Fraud* adalah suatu perbuatan melawan atau melanggar hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau dari luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. "*Fraud* menurut SPA 240 yang diterbitkan IAPI (berlaku 1 Januari 2013) adalah sebagai berikut, "*Fraud* adalah suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh satu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum. "Kecurangan berkenaan dengan adanya keuntungan yang diperoleh seseorang dengan menghadirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Di dalamnya termasuk unsur-unsur tak terduga, tipu daya, licik, dan tidak jujur yang merugikan orang lain. Kecurangan (*Fraud*) juga perlu dibedakan dengan kekeliruan (*error*). Faktor yang membedakan antara kecurangan dan kekeliruan adalah apakah tindakan yang mendasarinya, yang berakibat terjadinya salah saji dalam laporan keuangan, berupa tindakan yang disengaja atau tidak disengaja (IAI, 2001). Sementara itu International Standards on Auditing (ISA) seksi 240 yang membahas tentang tanggung jawab auditor untuk mempertimbangan fraud, mendefinisikan fraud sebagai; " tindakan yang disengaja oleh anggota manajemen perusahaan, pihak yang berperan dalam governance, karyawan atau pihak ketiga yang melakukan pembohongan atau penipuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil atau illegal".

Menurut Mark R. Simmons, (dalam Koesmana dkk; 2007) untuk dikatakan sebagai fraud harus dipenuhi 4 (empat) kriteria yaitu:

1. Tindakan dilakukan secara sengaja
2. Adanya korban yang menganggap (karena tidak tahu keadaan sebenarnya) bahwa tindakan tersebut adalah wajar dan benar, pelaku dan korban dapat berupa individu, kelompok atau organisasi
3. Korban percaya dan bertindak atas dasar tindakan pelaku
4. Korban menderita rugi akibat tindakan pelaku.

b. Ruang Lingkup

Kecurangan atau yang biasa disebut dengan *Fraud* merupakan praktik yang dapat dilakukan oleh orang-orang dari dalam maupun dari luar organisasi, untuk mendapatkan keuntungan, baik pribadi maupun kelompok, yang mana secara langsung maupun tidak langsung, tindakan tersebut dapat merugikan pihak lain (Anonymous, 2006). Bahkan kecurangan yang dilakukan dapat merugikan keuangan perusahaan / negara. Pelaku kecurangan biasanya merupakan oknum pegawai atau orang yang bekerja di dalam suatu organisasi atau perusahaan dimana tindak kecurangan tersebut dilakukan. Biasanya, pelaku adalah orang yang tugas fungsionalnya tidak hanya menjalankan sistem pengendalian intern, tetapi juga ikut mengoperasikan sistem operasi instansi atau perusahaan. Oleh sebab itu, pelaku sulit sekali terdeteksi karena kinerjanya yang tampak telah dipercaya, kemampuan berkomunikasi yang baik, pengalaman kerja yang luas, dan kepribadian yang menarik. Dalam hal ini, yang akan peneliti bahas adalah kecurangan / *fraud* yang terjadi khususnya pada kegiatan pengadaan barang/jasa pada sektor public (Instansi Pemerintahan). Terdapat berbagai bentuk kecurangan yang terjadi di sektor publik,

baik yang berupa korupsi (*Corruption*), penyalahgunaan aset (*Asset Misappropriation*), maupun *Fraudulent Statements*. Kecurangan seperti yang telah dijelaskan di atas telah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi (sesuai yang telah disebutkan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 tahun 2001 yang menyatakan bahwa perbuatan curang dan perbuatan yang merugikan keuangan negara merupakan jenis-jenis tindak pidana korupsi).

c. Indikator

Berdasarkan pembagian indikator *fraud* tersebut terdiri dari:

- 2.1.1 *Corruption* (korupsi), yang terdiri dari empat ranting yaitu *conflicts of interests* (benturan kepentingan), *bribery* (penyuapan), *illegal gratuities* (pemberian hadiah atau gatifikasi) dan *economic extration*. Benturan kepentingan bisa terjadi dalam transaksi pembelian maupun penjualan, yang melakukan praktik “KKN” (pemerintah dengan rekanan).
- 2.1.2 *Asset Misappropriation* (penyalahgunaan aset), merupakan pencurian aset perusahaan, dengan melibatkan orang dalam seperti manajemen dan karyawan atau pihak ketiga lainnya, misalnya pencurian kas, persediaan dan pengeluaran yang bersifat *fraud*. *Fraud* penyalahgunaan aset akan menyebabkan laporan keuangan disajikan tidak sesuai dengan pedoman Prinsip Akuntansi Berlaku Umum, bahkan justru melibatkan penyesuaianpenyesuaian yang dibuat untuk menyembunyikan penyalahgunaan aset tersebut. Cabang ini terdiri dari 2 (dua) ranting yaitu *Cash dan Inventory dan All Others Assets*.

2.1.3 *Fraudulent Statement* (laporan yang dimanipulasi) yang meliputi *fraudulent financial statements* (*fraud* laporan keuangan) dan *non-fraudulent financial statements*. *Fraud* dalam laporan keuangan merupakan bentuk salah saji atau kelalaian yang disengaja atas jumlah atau pengungkapan yang menyesatkan pengguna laporan keuangan tersebut, seperti menyajikan aset atau pendapatan lebih tinggi dari yang sebenarnya (*asset/revenue overstatement*) atau menyajikan aset dan revenue lebih rendah dari yang sebenarnya (*asset/revenue understatement*). *Fraud* bentuk ini meliputi penyalahgunaan prinsip-prinsip akuntansi yang disengaja, perubahan catatan atau pemalsuan catatan.

Berdasarkan salah satu indikator mengenai korupsi, yaitu *Corruption Perceptions Index* (CPI) atau yang biasa kita sebut dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) menunjukkan bahwa Indonesia dalam kurun waktu 2005-2010 merupakan salah satu negara yang memiliki skor IPK yang buruk yaitu, 2.2 pada tahun 2005, 2.4 pada tahun 2006 dan pada tahun 2007, 2.6 pada tahun 2008, 2.8 pada tahun 2009, dan yang terakhir yaitu 2.8 pada tahun 2010² (hal ini cukup mengejutkan bahwa Indonesia masih bisa mempertahankan skor pada tahun terakhir mengingat bahwa pemerintah telah gagal meningkatkan integritas penegak hukum (*judiciary*) dan agen penegak hukum (*law enforcement agencies*)). Suatu survey lebih lanjut mengenai korupsi, baik berdasarkan Global Corruption Barometer (GCB, 2005) maupun *Bribe Payers Index* (BPI, 2002).

2.1.4 Good Governance

a. Pengertian Good Governance

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) adalah seluruh aspek yang terkait dengan control dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip *Good Governance and Clean Government*, maka pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (*independen*), serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait (*stakeholder*) secara adil, transparan, profesional dan akuntabel. Pada lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dalam upaya membangun pemerintahan yang baik (*good governance*) dan transparan telah dilakukan berbagai upaya, seperti diantaranya peningkatan Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa. Peningkatan Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa, juga diterapkan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan program kerja dan kegiatan-kegiatan, yang diselenggarakan secara bertanggungjawab dan bersih sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dan kebijaksanaan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Beberapa kebijakan daerah dibuat dengan tujuan untuk mengembangkan sumber daya yang ada, agar menghasilkan Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa yang optimal.

b. Ruang Lingkup

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Lamongan, Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa yang ada masih rendah. Hal ini

dapat dilihat dari fenomena pegawai yang ada diketahui belum semua pegawai memiliki komitmen yang kuat terhadap kinerja pengadaan barang dan jasa seperti beberapa pegawai memiliki kemampuan yang lemah dalam melaksanakan pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sesuai target waktu. Selain itu dalam pelaksanaan proses seleksi perusahaan pemenang lelang masih ditemukan adanya kejanggalan seperti panitia menyeleksi perusahaan pemenang dengan nilai penawaran terendah, sementara penawaran tertinggi tidak dievaluasi. Hal ini diduga disebabkan oleh adanya faktor penerapan *Electronic Procurement* dan *Good Governance*. Selain itu adanya factor lain diduga juga dapat mempengaruhi Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa yaitu kepemimpinan, kompensasi, koordinasi, budaya kerja, disiplin kerja, pendidikan formal, fasilitas kerja, kualitas sumber daya manusia, perencanaan sumber daya manusia, kompetensi jabatan, budaya organisasi, pengawasan melekat dan lain-lain. Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kabupaten Lamongan dapat dipengaruhi oleh faktor penerapan *Electronic Procurement*. *Electronic Procurement* dapat diartikan sebagai sebuah website yang merupakan system lelang dalam pengadaan barang oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet.

c. Indikator

Berdasarkan hasil observasi pada Pemerintah Kabupaten Lamongan, *Good Governance* masih lemah. Hal ini disebabkan oleh perbaikan system birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Hal tersebut terkait dengan tingginya kompleksitas dalam mencari solusi perbaikan. Selain itu masih lemah nya pengawasan terhadap kinerja aparatur negara yang berakibat pada kondisi kinerja birokrasi yang masih jauh dari harapan. Banyaknya permasalahan birokrasi tersebut

belum sepenuhnya teratasi, baik dari sisi internal maupun eksternal. Dari sisi internal, factor demokrasi dan desentralisasi telah membawa dampak pada proses pengambilan keputusan kebijakan publik. Dampak tersebut terkait dengan makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik, meningkatnya tuntutan penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik antara lain transparansi, akuntabilitas, dan kualitas kinerja public serta taat hukum. Secara khusus dari sisi internal birokrasi, berbagai permasalahan masih banyak yang dihadapi, antara lain pelanggaran disiplin, penyalahgunaan kewenangan, dan masih terdapat praktik KKN. Dari sisi eksternal, factor globalisasi dan revolusi teknologi informasi (*E-Government*) merupakan tantangan tersendiri dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa. Hal tersebut terkait dengan makin meningkatnya ketidakpastian akibat perubahan faktor lingkungan politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi dengan cepat.

Berdasarkan “*good governance*” memiliki beberapa indikator pengukuran.

Diantara indikator tersebut adalah :

1. Transparansi

Transparansi merupakan proses keterbukaan menyampaikan informasi atau aktivitas yang dilakukan. Harapannya, agar pihak-pihak eksternal yang secara tidak langsung ikut bertanggung jawab dapat ikut memberikan pengawasan. Memfasilitasi akses informasi menjadi faktor penting terciptanya transparansi ini.

2. Partisipasi

Partisipasi merujuk pada keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan kebijakan. Masukan dari berbagai pihak dalam proses

pembuatan kebijakan dapat membantu pembuat kebijakan mempertimbangkan berbagai persoalan, perspektif, dan opsi-opsi alternatif dalam menyelesaikan suatu persoalan. Proses partisipasi membuka peluang bagi pembuat kebijakan untuk mendapatkan pengetahuan baru, mengintegrasikan harapan publik kedalam proses pengambilan kebijakan, sekaligus mengantisipasi terjadinya konflik sosial yang mungkin muncul. Komponen yang menjamin akses partisipasi mencakup, tersedianya ruang formal melalui forum-forum yang relevan, adanya mekanisme untuk memastikan partisipasi publik, proses yang inklusif dan terbuka, dan adanya kepastian masukan dari publik akan diakomodir di dalam penyusunan kebijakan.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas didefinisikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas peraturan yang telah dibuat. Proses ini juga sekaligus menguji seberapa kredibel suatu kebijakan tidak berpihak pada golongan tertentu. Akuntabilitas akan melewati beberapa proses pengujian tertentu. Proses yang terstruktur ini diharapkan akan mampu membaca celah-celah kekeliruan, seperti penyimpangan anggaran atau pelimpahan kekuasaan yang kurang tepat. Mekanisme akuntabilitas juga memberikan kesempatan kepada para pemangku kebijakan untuk untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan konsesus dalam pelaksanaan tata kelola di bidang tertentu.

4. Koordinasi

Koordinasi adalah sebuah mekanisme yang memastikan bahwa seluruh pemangku kebijakan yang memiliki kepentingan bersama telah memiliki

kesamaan pandangan. Kesamaan pandangan ini dapat diwujudkan dengan mengintegrasikan visi dan misi pada masing-masing lembaga. Koordinasi menjadi faktor yang sangat penting, karena kekacauan koordinasi dapat menyebabkan efisiensi dan efektivitas kerja menjadi terganggu.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Populasi dan Sampel	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Titik Aryati dan Leviadi Pangaribuan (2019)	Analisis pengaruh Implementasi E-Procurement dan kompetensi pegawai terhadap kinerja pengadaan barang dan jasa Kementrian Keuangan	E-Procurement (X)	Populasi : Jumlah populasi terdiri dari 1.089 pengguna yang tersebar di seluruh satuan kerja (satker) lingkup Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia. Sampel : berjumlah 92.	menggunakan teknik statistik deskriptif dan kuesioner	Implementasi <i>E-Procurement</i> berpengaruh terhadap kinerja pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Keuangan. Kompetensi pegawai berpengaruh terhadap kinerja pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Keuangan.
2.	Mahardika Lintangsar i, Dini Wahyu Hapsari,	Pengaruh Implementasi <i>E-Procurement</i> dan Pengendalian	E-Procurement (X) <i>Fraud (Y1)</i>	Populasi : Seluruh Pegawai PT.PLN (Persero)	Menggunakan analisis statistik deskriptif, pengujian validitas dan	Menunjukkan bahwa implementasi <i>e-procurement</i> , pengendalian

	Eddy Budiono (2019)	Internal terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> (Studi Empiris pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten)		Distribusi Jawa Barat dan Banten. Sampel : pegawai bagian pengadaan barang dan jasa.	reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis linier berganda, dan pengujian hipotesis dengan menggunakan bantuan <i>software SPSS</i> 24.	internal dan pencegahan di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten tergolong baik. Berdasarkan pengujian hipotesis, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi <i>e-procurement</i> dan pengendalian internal berpengaruh secara parsial terhadap pencegahan <i>fraud</i> . Secara simultan, implementasi <i>e-procurement</i> dan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> PT.PLN (Persero)
--	---------------------	---	--	--	--	---

						Distribusi Jawa Barat dan Banten.
3.	Anita Primastiwi, Dewi Kusuma Wardani, Hanisah (2020)	Pengaruh Penerapan <i>E-Procurement</i> dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa Di Sektor Publik	E-Procurement (X) <i>Fraud (Y1)</i>	Populasi : pelaku pengadaan barang dan jasa di Unit Layanan Pengadaan dan Satuan Kerja Perangkat Kota Yogyakarta. Sampel : pelaku pengadaan yang menjabat minimal 1 tahun yang telah dianggap mengerti atau menguasai dalam bidang pengadaan.	Menggunakan metode kuantitatif dan data primer.	Menunjukkan bahwa keberadaan sistem e-procurement dan pengendalian internal memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pencegahan penipuan pengadaan barang dan jasa
4.	Provita Wijayanti, Rustam Hanafi (2018)	Pencegahan <i>fraud</i> pada pemerintahan desa	<i>Fraud (Y1)</i>	Populasi : berjumlah 100 orang perangkat desa yang berasal dari 20 desa di Kecamatan	Analisis regresi <i>dummy</i> berganda	Menunjukkan bahwa karakteristik personal, efektivitas pengendalian internal, budaya etis organisasi,

				Sayung. Sampel : 40 perangkat desa di Kecamatan Sayung.		serta moralitas individu secara bersama-sama berpengaruh pada kecenderungan <i>fraud</i> . Secara parsial karakteristik personal yang berpengaruh pada kecenderungan <i>fraud</i> adalah usia dan pengalaman kerja dengan arah pengaruh yang negatif.
5.	Anantawik rama Tungga Atmadja, Komang Adi Kurniawan Saputra (2017)	Pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan keuangan desa	<i>Fraud</i> (Y1)	Populasi : kepala desa yang desanya menerima dana desa di Kabupaten Buleleng yang berjumlah 129 desa (Balipost, 2015). Sampel : 57 Desa yang menerima dana desa di Kabupaten	Menggunakan regresi linier berganda dan <i>Moderated Regression Analysis (MRA)</i> .	Menunjukkan bahwa kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengelolaan keuangan desa, serta moralitas terbukti sebagai pemoderasi

				Buleleng.		pengaruh kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan keuangan desa.
6.	Irmah Halimah Bachtiar, Ela Elliyana (2020)	Determinan upaya pencegahan <i>fraud</i> pemerintah desa	<i>Fraud</i> (Y1)	Populasi : Aparat desa meliputi kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan staf desa yang ada di Kabupaten Bulukumba. Sampel : berjumlah 100 orang dari 20 desa yang mewakili 10 kecamatan di Kabupaten Bulukumba.	Menggunakan regresi linier berganda.	Upaya pencegahan <i>fraud</i> di Kabupaten Bulukumba dipengaruhi pengendalian internal dan budaya etis organisasi, sedangkan karakteristik personal yaitu umur aparat desa tidak berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> di Kabupaten Bulukumba.
7.	Krisnhoe Sukma Danuta	<i>Crowe's Fraud Pentagon Theory</i> Dalam Pencegahan	<i>Fraud</i> (Y1) E-Procurement (X)	Populasi :Seluruh Unit Layanan Pengadaan	Menggunakan teknik analisis data kualitatif	Bahwa <i>E-Procurement</i> dapat mengurangi

		<i>Fraud</i> Pada Proses Pengadaan Melalui <i>E-Procurement</i>		(ULP), Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dan Inspektorat salah satu pemerintah daerah di Wilayah Yogyakarta. Sampel : Seluruh Unit Layanan Pengadaan (ULP), Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dan Inspektorat salah satu pemerintah daerah di Wilayah Yogyakarta.		timbulnya arogansi dan kompetensi melalui transparansi yang diperoleh setelah menggunakan <i>eprocurement</i> .
8.	Desi Wulandari (2020)	Good Corporate Governance terhadap kinerja perusahaan (studi empiris pada perusahaan sektor properti	Good Governance (Y2)	Populasi : pada perusahaan properti yang terdaftar di bursa efek indonesia. Sampel :	Regresi berganda	Menunjukkan bahwa dewan direksi dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja

		yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2016-2018)		Seluruh perusahaan properti yang terdaftar di bursa efek indonesia.		perusahaan.
9.	M Salim, Syamsuddin Syarifuddin (2016)	Efek moderasi komitmen organisasi E-Procurement terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> pengadaan barang dan jasa	E-Procurement (X) <i>Fraud</i> (Y1)	Populasi : Aparatur pengadaan barang dan jasa pemerintah kota Parepare Sampel: sebanyak 140 Aparatur pengadaan barang dan jasa pemerintah kota Parepare	Menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) berdasarkan program AMOS 23 dan SPSS 22.	Menunjukkan bahwa efek moderasi komitmen organisasi pada implementasi E-Procurement berpengaruh secara signifikan dan memiliki arah yang positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa pemerintah.
10.	Lisa Oktaviani (2017)	Pengaruh penerapan E-Procurement terhadap pencegahan dan pendeteksi <i>fraud</i> di sektor publik (studi empiris pada satuan kerja perangkat	E-Procurement (X) <i>Fraud</i> (Y1)	Populasi : Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Sumatera Barat Sampel : SKPD Kota Padang, Kota Solok,	Menggunakan analisis regresi linier berganda, uji normalitas, uji f dengan menggunakan bantuan software SPSS	Dimana tahap perencanaan, dan tahap penyusunan dokumen lelang berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud procurement</i> , serta pada tahap

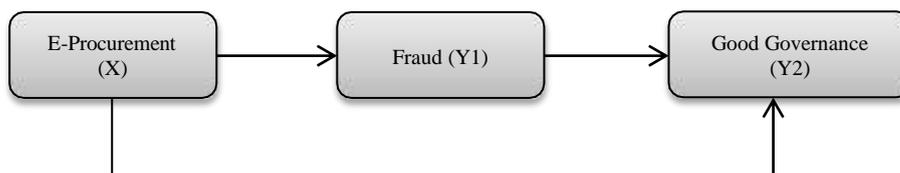
		daerah kota padang, kabupaten solok, kota solok dan kabupaten pesisir selatan)		Kabupaten Solok dan Kabupaten Pesisir Selatan.		sanggahan lelang berpengaruh terhadap pendeteksian <i>fraud procurement</i> .
11.	I Made Budi Adiana, I Nyoman Mahaendra Yasa, Gede Wardana (2018)	PENGARUH ELECTRONIC PROCUREMENT TERHADAP GOOD GOVERNANCE PADA PEMERINTAH PROVINSI BALI	E-Procurement (X) Good Governance (Y2)	Populasi : penyedia barang/jasa yang pernah mengikuti dan memenangkan E-Procurement serta mengikuti seluruh tahapan pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Provinsi Bali. Sampel :sebanyak 90 sampel.	Teknik deskriptif dan persamaan struktural dengan menggunakan alternatif SEM PLS.	Menunjukkan bahwa variabel Electronic Procurement dan Komitmen Pegawai Berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Layanan Pengadaan dengan nilai R-Square Sebesar 0,596
12.	Meyzi Wiguna Putri, Zulkifli (2019)	Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Dan Pengawasan	Fraud (Y1) Good Governance (Y2)	Populasi : semua pegawai yang pegawai yang terlibat dalam pengawasan	SEM (Structural Equation Modelling) yang dioperasikan melalui	Menunjukkan bahwa Pelaksanaan Good Governance dan Pengawasan

		Internal Terhadap Kinerja Organisasi Melalui Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lembaga Administrasi Negara		internal (Auditor, Pengawas Pemerintah pada Inspektorat LAN), pengadaan barang dan jasa (Pejabat Pembuat Komitmen, Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, Pejabat Pengadaan, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Pengelola Anggaran dan Perencanaan) dan pegawai pada unit kerja yang memperoleh layanan dari pelaksanaan pengawasan dan pengadaan barang/jasa yang tersebar	program Lisrel.	Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa serta Pelaksanaan Good Governance, Pengawasan Internal dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Organisasi.
--	--	---	--	--	-----------------	---

				diseluruh Lembaga Administrasi baik di Instansi Pusat maupun Daerah. Sampel : 215 – 430 responden.		
13.	Rahmawan Satriyo Nugroho, Alfi Haris Wanto, Trisnawati	Pengaruh Implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) Terhadap Fraud pengadaan barang/jasa Pemerintah (Studi pada satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan)	E-Procurement (X1) <i>Fraud</i> (Y1)	Populasi : pengguna/operator sistem E-procurement di lingkup SKPD Kabupaten Magetan Sampel : berjumlah 45 orang	Menggunakan alat bantu program aplikasi komputer SPSS Versi 20	Menunjukkan bahwa sistem E-Procurement berpengaruh secara signifikan dan memiliki arah yang positif terhadap <i>Fraud</i> pengadaan barang/jasa pemerintah.

2.1.6 Kerangka Berfikir

Gambar 2. 2 Kerangka Berfikir



Keterangan :

- H1 : *E-Procurement* berpengaruh terhadap *Fraud*
 H2 : *E-Procurement* berpengaruh terhadap *Good Governance*
 H3 : *Fraud* berpengaruh terhadap *Good Governance*
 H4 : *E-Procurement* berpengaruh terhadap *Good Governance* melalui *Fraud*

2.1.7 Konsep Hipotesis

a. Pengaruh *E-Procurement* terhadap *Fraud*

E-Procurement merupakan sistem pengadaan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik seperti internet atau jaringan komputer. *E-Procurement* diterapkan dalam proses pembelian dan penjualan secara online supaya lebih efisien dan efektif. *E-Procurement* mengurangi proses-proses yang tidak diperlukan dalam sebuah proses bisnis. Dalam prakteknya, *E-Procurement* mengurangi penggunaan kertas, menghemat waktu dan mengurangi penggunaan tenaga kerja dalam prosesnya.

Menurut Lisa Oktaviani (2017) Pengaruh penerapan *E-Procurement* terhadap pencegahan dan pendeteksi *fraud* di sektor publik (studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah kota padang, kabupaten solok, kota solok dan kabupaten pesisir selatan) Dimana tahap perencanaan, dan tahap penyusunan dokumen lelang berpengaruh terhadap pencegahan *fraud procurement*, serta pada tahap sanggahan lelang berpengaruh terhadap pendeteksi *fraud procurement*.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah

H1 : *E-Procurement* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Fraud*

b. Pengaruh *E-Procurement* terhadap *Good Governance*

Sebelum adanya e-procurement, pengadaan barang maupun jasa pemerintah masih memiliki kelemahan dalam sistem prosedur, diantaranya: tidak transparan/ terbuka, tidak dapat diketahui dengan mudah dan terus menerus, ketentuan-ketentuan pengadaan tidak jelas dan multitafsir serta persyaratan-persyaratan yang berlebihan, adanya peluang yang memungkinkan stakeholder terkait untuk saling intervensi, tata cara evaluasi penawaran yang kurang jelas mengandung ketidakpastian serta menghasilkan penyedia jasa yang diragukan kemampuan dan keahliannya untuk dapat menyelesaikan pekerjaan yang berkualitas.

Dilihat dari kelemahan sistem prosedur tersebut, maka dapat disimpulkan jika pengadaan barang/jasa pemerintah sebelum diberlakukannya e-procurement sangat tidak efektif dan tidak efisien. Dengan adanya e-procurement diharapkan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu efisien, efektif, bersaing, transparansi, adil/ tidak diskriminatif dan tanggung jawab. Dengan terpenuhinya prinsip tersebut, maka pemerintah dapat menciptakan *good governance*, yang mana prinsip dalam pengadaan barang/ jasa tersebut memenuhi kriteria sebagaimana suatu pemerintahan dapat dikatakan sebagai *good governance*.

Menurut I Made Budi Adiana, I Nyoman Mahaendra Yasa, Gede Wardana (2018) pengaruh *electronic procurement* terhadap *good governance* pada pemerintah provinsi bali Menunjukkan bahwa variabel Electronic Procurement dan Komitmen Pegawai Berpengaruh positif dan

signifikan terhadap Kualitas Layanan Pengadaan dengan nilai R-Square Sebesar 0,596

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis penelitian ini adalah

H2 : *E- Procurement* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Good Governance*

c. Pengaruh *Fraud* terhadap *Good Governance*

Fraud merupakan praktik yang dapat dilakukan oleh orang-orang dari dalam maupun dari luar organisasi, untuk mendapatkan keuntungan, baik pribadi maupun kelompok, yang mana secara langsung maupun tidak langsung, tindakan tersebut dapat merugikan pihak lain (Anonymous, 2006). Bahkan kecurangan yang dilakukan dapat merugikan keuangan perusahaan / negara.

Menurut Meyzi Wiguna Putri, Zulkifli (2019) pengaruh pelaksanaan *good governance* dan pengawasan internal terhadap kinerja organisasi melalui pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lembaga administrasi negara Menunjukkan bahwa Pelaksanaan Good Governance dan Pengawasan Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa serta Pelaksanaan Good Governance, pengawasan internal dan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi.

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis penelitian ini adalah

H3 : *Fraud* berpengaruh yang signifikan terhadap *Good Governance*

d. Pengaruh *E-Procurement* terhadap *Good Governance* melalui *Fraud*

Good Governance adalah seluruh aspek yang terkait dengan control dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip *Good Governance*, maka pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (*independen*), serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait (*stakeholder*) secara adil, transparan, profesional dan akuntabel.

Pelayanan pengadaan barang dan jasa dilingkungan instansi pemerintah saat ini mulai dikembangkan dengan *E-Procurement*. Dengan adanya *E-Procurement* maka maladministrasi, seperti persekongkolan antara pengusaha dengan oknum panitia tender tidak akan terjadi lagi. Salah satu kegiatan pemerintah yang memungkinkan terjadinya tindak pidana korupsi atau kolusi dan nepotisme adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah. Banyaknya manfaat *E-Procurement* menjadikan *good governance* pemerintah semakin baik dalam mendeteksi tindak kecurangan karena *E-Procurement* mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, menjamin persamaan kesempatan serta menciptakan situasi yang kondusif.

Hasil penelitian dari Elbahnasawy (2014) dan Goel *et al* (2012) yang mana hasil penelitiannya menghasilkan bahwa *good governance* dapat meminimalisir korupsi dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas

semakin tinggi kepekaan akan korupsi maka tindakan pencegahan korupsi akan semakin tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis penelitian ini adalah

H4 : *E-Procurement* berpengaruh pada *good governance* melalui *fraud*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2013:13) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Pengumpulan data berupa angka-angka dan menggunakan bantuan statistik untuk menganalisis data. Teknik pengumpulan data menggunakan metode kuantitatif, dan untuk mendapatkan data-data penelitian perlu melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan menyebarkan kuesioner, dan lain sebagainya.

3.2 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih penelitian di Pemerintah Kabupaten Lamongan Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, sebagai lokasi penelitian. Pemerintah Kabupaten Lamongan merupakan lokasi yang strategis untuk penelitian ini dikarenakan target responden pada penelitian ini di bagian pengadaan barang dan jasa Setda Kabupaten Lamongan.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas serta karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ambil kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini, populasi dalam penelitian adalah responden penyedia/peserta tender tahun 2020 di Pemkab Lamongan sebanyak 889 orang

3.3.2 Sampel

Sampel adalah suatu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2013). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling yang mana merupakan penentuan sampel berdasarkan kriteria yang ditetapkan sesuai dengan keinginan penulis. Kriteria yang ditentukan adalah sebagai berikut usia minimal 24 tahun dan maksimal 45 tahun, menerapkan *e-procurement* dalam proses pengadaan barang dan jasa, minimal telah berdiri selama 1 tahun.

Besarnya sampel pada penelitian ini ditemukan dengan rumus slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

E = persen tingkat kesalahan yang dapat ditolerir yaitu 0,05

Dengan menggunakan rumus tersebut, maka jumlah sampel (n) yang diperoleh adalah:

$$\begin{aligned}
 n &= \frac{N}{1 + Ne^2} \\
 &= \frac{889}{1 + 889 \cdot 0,05^2} \\
 &= \frac{889}{1 + 889 \cdot 0,0025} \\
 &= \frac{880}{3,2225} \\
 &= 276
 \end{aligned}$$

Maka sampel pada penelitian ini adalah 276

3.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objeknya. Menurut Sugiyono (2009:402) “Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Data diperoleh dari jawaban atas kuesioner yang dibagikan kepada responden. Data yang terkumpul melalui daftar pertanyaan merupakan data kualitatif, selanjutnya diubah menjadi data kuantitatif dengan cara pemberian nilai pada hasil jawaban. Untuk penskoran dari tiap jawaban yang diberikan digunakan skala likert dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk jawaban Sangat Setuju (SS) responden diberi skor 5
- b. Untuk jawaban Setuju (S) responden diberi skor 4
- c. Untuk jawaban Kurang setuju (KS) responden diberi skor 3

- d. Untuk jawaban Tidak Setuju (TS) responden diberi skor 2
- e. Untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) responden diberi skor 1

3.5 Metode Pengumpulan Data

Untuk dapat mengumpulkan data serta menganalisis dengan valid, maka dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan ialah :

1. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden, dengan harapan responden akan memberikan respon pada pertanyaan tersebut.

Kuesioner yang diberikan kepada responden disertai dengan surat permohonan pengisian kuesioner dan penjelasan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. Skala yang digunakan kuesioner penelitian ini adalah skala likert, merupakan alat yang dijadikan untuk mengukur sikap, persepsi dan pendapat seseorang sekaligus kelompok orang tentang suatu kejadian atau gejala sosial yang terjadi. Dalam hal ini sudah dijelaskan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut dengan variabel penelitian. Kemudian dijabarkan melalui dimensi-dimensi menjadi sub-variabel, kemudian menjadi indikator yang dapat dijadikan tolak ukur untuk menyusun item-item pertanyaan atau pernyataan yang berhubungan dengan variabel penelitian. Pada penelitian ini, indikator dalam landasan teori dijadikan acuan untuk membuat instrument pernyataan dalam kuesioner.

Pada penelitian ini menggunakan 5 kategori jawaban yaitu :

Tabel 3. 1
Skala Likert

Makna	Skor/Nilai
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Kurang Setuju (KS)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber : Sugiyono

1. Studi Kepustakaan

Pada penelitian ini peneliti memperoleh data-data dari jurnal-jurnal ilmiah atau penelitian terdahulu, artikel, dan berbagai referensi lainnya, yang ada kaitannya dengan variabel atau masalah-masalah yang diteliti.

2. Observasi

Observasi ialah metode penelitian dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada obyek penelitian. Menurut Sutrisno Hadi, observasi merupakan proses yang kompleks, proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Metode pengumpulan data dengan observasi digunakan bila peneliti berkenaan dengan perilaku manusia, gejala-gejala alam, proses kerja dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Disini peneliti melakukan observasi selama melakukan kegiatan pra riset hingga menemukan

permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan variabel yang dijadikan sebagai variabel penelitian.

2.6 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

2.6.1 Variabel Penelitian

1. Variabel Independen (Variabel Bebas)

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen (Sugiyono, 2014). Sedangkan menurut Widodo (2015) variabel independen merupakan variabel penyebab terjadinya variabel dependen. Pada penelitian ini variabel independennya adalah E-Procurement

2. Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi variabel independen (Sugiyono, 2014). Sedangkan menurut Widodo (2015) variabel dependen merupakan variabel yang memberikan respon atau reaksi apabila dihubungkan dengan variabel independen. Pada penelitian ini, variabel dependennya adalah Fraud dan Good Governance

2.6.2 Definisi Operasional

Tabel 3. 2

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

No.	Variabel	Indikator	Item
1.	E-Procurement (X)	1. Kuantitas 2. Kualitas 3. ketepatan waktu.	1. minimnya keluhan dari penyedia jasa menjadikan LPSE sebagai program yang dikatakan berhasil dan efektif secara kuantitas. 2. panitia pengadaan belum pernah

			<p>menemukan adanya keluhan seputar penggunaan SPSE.</p> <p>3. penyedia jasa belum pernah melakukan keterlambatan dalam memasukan dokumen penawaran</p>
2.	Fraud (Y1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Corruption (korupsi) 2. Asset Misappropriation (penyalahgunaan aset) 3. Fradulent Statement (laporan yang dimanipulasi) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. 2. pencurian aset perusahaan, dengan melibatkan orang dalam seperti manajemen dan karyawan atau pihak ketiga lainnya 3. bentuk salah saji atau kelalaian yang disengaja atas jumlah atau pengungkapan yang menyesatkan pengguna laporan keuangan tersebut
3.	Good Governance (Y2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transparansi 2. Partisipasi 3. Akuntabilitas 4. Koordinasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. proses keterbukaan menyampaikan informasi atau aktivitas yang dilakukan. 2. pada keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan kebijakan. 3. bentuk pertanggungjawaban atas peraturan yang telah dibuat. 4. sebuah mekanisme yang memastikan bahwa seluruh pemangku kebijakan yang memiliki kepentingan bersama telah memiliki kesamaan pandangan.

3.7 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menganalisis data menggunakan *software* SPSS 24.0 dengan terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis. Tujuan dari analisis data meringkas data dalam bentuk mudah dipahami, sehingga hubungan antara penelitian dapat diuji untuk menjawab hipotesis dalam penelitian.

3.7.1 Uji Validitas

Uji validitas sangat dibutuhkan sebagai penguji keabsahan instrument penelitian sehingga bisa dimanfaatkan untuk alat mengolah data dalam melakukan penelitian. Dengan cara menganalisis kolerasi skor yang didapat dari setiap item pertanyaan kuesioner dengan skor total setiap varian. Teknik korelasi yang digunakan yaitu *person product moment correlation*:

$$r_{xy} = \frac{N\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N\sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Dimana:

r : koefisien korelasi antara (x) dengan skor total (y)

N : skor yang diperoleh dari seluruh item

X : skor yang diperoleh dari seluruh item

$\sum XY$: jumlah kuadrat dalam skor distribusi

$\sum X^2$: jumlah kuadrat dalam skor distribusi X

$\sum Y^2$: jumlah kuadrat dalam skor distribusi Y

Perhitungan uji validasi dari variabel X dan Y₁, Y₂ tersebut. Akan dilakukan dengan bantuan SPSS versi 24. Adapun kriteria penilaian uji validasi yaitu :

1. Apabila diketahui $r_{\text{hitung}} \geq r_{\text{table}}$ (pada taraf signifikan 0,05), maka dapat dinyatakan item kuesioner valid.
2. Apabila diketahui $r_{\text{hitung}} \leq r_{\text{table}}$ (pada taraf signifikan 0,05), maka dapat dinyatakan item kuesioner tidak valid.

3.7.2 Uji Reliabilitas

Uji Reabilitas merupakan suatu indeks yang mampu menunjukkan hasil pengukuran yang relatif konsisten apabila melakukan dua kali atau lebih satu kali dalam penelitian. Dengan tingkat kesalahan dalam penelitian yang besar. Maka agar dapat mengetahui hasil pengukuran yang sesungguhnya, diperlukan adanya pengujian atas pengukuran dan perhitungan tersebut. Pengujian reabilitas digunakan pada semua item pertanyaan kuesioner dalam penelitian ini menggunakan rumus koefisien *Cronbach Alpha*.

$$r_{11} = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{V_t^2} \right]$$

Dimana:

r_{11} : Reabilitas instrumen

k : Banyaknya butiran pertanyaan

$\sum \sigma_b^2$: Jumlah varian butir/item

V_t^2 : Varian total

Koefisien alpha dikatakan reliabel apabila nilai *Cornbach Alpha* > 0,6. Dan perhitungan dan pengolahan data dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 24.

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik pada penelitian ini meliputi:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan analisis data atau uji asumsi klasik, artinya sebelum kita melakukan analisis statistik untuk uji hipotesis dalam hal ini adalah analisis regresi, maka data penelitian tersebut harus di uji kenormalan distribusinya. Penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui apakah data penelitian terdistribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan statistik uji *Kolmogorov Smirnov*, Apabila nilai probabilitas 0,05 maka dapat terdapat hubungan secara linier kepada masing-masing variabel. Pada prinsipnya normalitas terdeteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya (Ghozali, 2013). Hasilnya data disebut normal apabila:

1. Adanya titik-titik mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Adanya titik-titik menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik (normalitas dan heteroskedastisitas) dalam analisis regresi linear berganda. Tujuan digunakannya uji multikolinearitas dalam penelitian adalah untuk

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi (hubungan kuat) antar variabel bebas atau variabel independet. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas atau tidak terjadi gejala multikolinearitas. Untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar variabel bebas dalam model regresi. Jika nilai VIF 10 dan atau nilai Tolerance 0,1 maka terdapat multikolinearitas, dan begitupula sebaliknya. Ghozali (2013) untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas didalam model regresi adalah sebagai berikut:

1. Nilai R² yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variable dependen. (Ghozali, 2013).
2. Menganalisis matrik kolerasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada kolerasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas. Tidak adanya kolerasi yang tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas dari multikolonieritas. Multikolonieritas dapat disebabkan adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen. (Ghozali, 2013).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Dan untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas yaitu

menggunakan uji Glejser untuk melihat adanya nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika residual varians yang Sama disebut dengan homoskedastisitas. Dan varians tidak Sama maka disebut dengan heteroskedastisitas. Dan jika nilai signifikansi 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, begitupun sebaliknya. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013). Menurut Ghozali (2013) Dasar analisisnya sebagai berikut:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. (Ghozali, 2013).
67
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. (Ghozali, 2013)

3.7.4 Uji Regresi Sederhana

1. Uji Koefisien Regresi Sederhana (Uji t)

Uji digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas (variabel independen) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat, dengan melihat tingkat signifikan yaitu 0,05. Apabila nilai signifikansi (sig) $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Apabila $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, begitupun sebaliknya.

2. Koefisiensi Determinasi (R^2)

Pada analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas (Independen) menjelaskan variabel terikat (dependen). Dimana koefisien nilai determinan R dapat ditunjukkan dalam SPSS, koefisien determinan terdapat pada Model *Summary* dan tertulis pada *R Square* yang terdapat pada tabel SPSS. Apabila nilai R^2 kecil maka dapat diartikan bahwa kemampuan variabel bebas tersebut menjelaskan variasi variabel terikat sangat terbatas.

3.7.5 Uji analisis jalur/ path

Analisis jalur/path merupakan analisis yang digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel dalam penelitian. Imam Ghozali (2013) analisa jalur bertujuan untuk menerangkan akibat langsung dan tidak langsung seperangkat variabel, sebagai variabel penyebab terhadap seperangkat variabel lainnya yang merupakan variabel terikat. Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi. Didalam analisis jalur mempelajari hubungan antara variabel terikat (Y) dan variabel bebas (X) yang disebabkan oleh variabel X nya sendiri atau ada variabel lain diantara kedua variabel tersebut sehingga variabel tidak secara langsung mempengaruhi variabel Y tetapi ada variabel lain sebagai variabel perantara (*intervening*).

3.7.6 Uji Sobel

Dalam uji sobel ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel mediasi yaitu *fraud*. Menurut Baron dan Kenny (1986) dalam Ghazali (2011) suatu variabel disebut *intervening* jika variabel tersebut ikut

mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Uji Sobel untuk menguji kekuatan dari pengaruh tidak langsung variabel independen (X) ke variabel dependen (Y2) melalui variabel intervening (Y1). Dengan cara perhitungan mengalikan pengaruh tidak langsung X ke Y2 melalui Y1 dengan cara mengalikan jalur X-Y1 (a) dengan jalur Y1-Y2 (b) atau ab. Jadi koefisien $ab = (c - c')$ dimana c adalah pengaruh X terhadap Y2 tanpa menghubungkan Y1 sedangkan c' adalah koefisien pengaruh X terhadap Y2 setelah menghubungkan Y1.

Ghozali (2011) pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan prosedur yang dikembangkan oleh Sobel (Sobel Test). Rumus uji Sobel adalah sebagai berikut:

$$Sab = \sqrt{b^2 sa^2 + a^2 sb^2 + sa^2 sb^2}$$

Dengan keterangan:

Sab : Besarnya standar error pengaruh tidak langsung

a : jalur variabel independen (X) dengan variabel intervening (Y1)

b : jalur variabel intervening (Y1) dengan variabel dependen (Y2)

sa : Standar error koefisien a

sb : standar error koefisien b

Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung, maka kita perlu menghitung nilai t dari koefisien dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{ab}{sab}$$

Nilai t hitung ini dibandingkan dengan nilai t tabel, jika nilai t hitung > nilai t tabel maka dapat disimpulkan terjadi pengaruh mediasi. Asumsi

uji sobel memerlukan jumlah sampel yang besar, jika jumlah sampel kecil, maka uji sobel kurang konservatif (Ghozali, 2011).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Profil Pemkab lamongan



Sumber : www.pemkab.lamongan.go.id

Gambar 4. 1 Logo Pemkab Lamongan

Kabupaten Lamongan adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibukotanya adalah Lamongan. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Gresik di timur, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang di selatan, serta Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban di barat. Pembagian administrasi Kabupaten Lamongan terdiri atas 27 kecamatan yang terdiri atas sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan di Kecamatan Lamongan. Sejarah Nama Lamongan berasal dari nama seorang tokoh pada masa silam. Pada zaman dulu, ada seorang pemuda bernama Ranggahadi, karena mendapatkan pangkat rangga, maka ia disebut Ranggahadi. Ranggahadi kemudian bernama Mbah Lamong, yaitu sebutan yang diberikan oleh rakyat daerah ini. Karena Ranggahadi pandai Ngemong Rakyat, pandai membina daerah dan mahir

menyebarkan ajaran agama Islam serta dicintai oleh seluruh rakyatnya, dari asal kata Mbah Lamong inilah kawasan ini lalu disebut Lamongan. Adapun yang menobatkan Tumenggung Surajaya menjadi Adipati Lamongan yang pertama, tidak lain adalah Kanjeng Sunan Giri IV yang bergelar Sunan Prapen. Wisuda tersebut bertepatan dengan hari pasamuhan agung yang diselenggarakan di Puri Kasunanan Giri di Gresik, yang dihadiri oleh para pembesar yang sudah masuk agama Islam dan para Sentana Agung Kasunanan Giri.

Pelaksanaan Pasamuhan Agung tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Besar Islam yaitu Idhul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Berbeda dengan daerah-daerah Kabupaten lain khususnya di Jawa Timur yang kebanyakan mengambil sumber dari sesuatu prasasti, atau dari suatu Candi dan dari peninggalan sejarah yang lain, tetapi hari lahir lamongan mengambil sumber dari buku wasiat. Silsilah Kanjeng Sunan Giri yang ditulis tangan dalam huruf Jawa Kuno/Lama yang disimpan oleh Juru Kunci Makam Giri di Gresik. Almarhum Bapak Muhammad Baddawi di dalam buku tersebut ditulis, bahwa diwisudanya Tumenggung Surajaya menjadi Adipati Lamongan dilakukan dalam pasamuhan agung di Tahun 976 H. Yang ditulis dalam buku wasiat tersebut memang hanya tahunnya saja, sedangkan tanggal, hari dan bulannya tidak dituliskan. Oleh karena itu, maka Panitia Khusus Penggali Hari Jadi Lamongan mencari pembuktian sebagai dasar yang kuat guna mencari dan menetapkan tanggal, hari dan bulannya. Setelah Panitia menelusuri buku sejarah, terutama yang bersangkutan dengan Kasunanan Giri, serta Sejarah para wali dan adat istiadat di waktu itu, akhirnya Panitia menemukan bukti, bahwa adat atau tradisi kuno yang berlaku di zaman Kasunanan Giri dan Kerajaan Islam di Jawa waktu itu, selalu melaksanakan pasamuhan agung yang utama dengan memanggil

menghadap para Adipati, Tumenggung serta para pembesar lainnya yang sudah memeluk agama Islam. Pasamuhan Agung tersebut dilaksanakan bersamaan dengan Hari Peringatan Islam tanggal 10 Dzulhijjah yang disebut Garebeg Besar atau Idhul Adha.

Berdasarkan adat yang berlaku pada saat itu, maka Panitia menetapkan wisuda Tumenggung Surajaya menjadi Adipati Lamongan yang pertama dilakukan dalam pasamuhan agung Garebeg Besar pada tanggal 10 Dzulhijjah Tahun 976 Hijriyah. Selanjutnya Panitia menelusuri jalannya tarikh hijriyah dipadukan dengan jalannya tarikh masehi, dengan berpedoman tanggal 1 Muharam Tahun 1 Hijriyah jatuh pada tanggal 16 Juni 622 Masehi, akhirnya Panitia Menemukan bahwa tanggal 10 Dzulhijjah 976 H., itu jatuh pada Hari Kamis Pahing tanggal 26 Mei 1569 M. Dengan demikian jelas bahwa perkembangan daerah Lamongan sampai akhirnya menjadi wilayah Kabupaten Lamongan, sepenuhnya berlangsung di zaman keislaman dengan Kasultanan Pajang sebagai pusat pemerintahan. Tetapi yang bertindak meningkatkan Kranggan Lamongan menjadi Kabupaten Lamongan serta yang mengangkat/mewisuda Surajaya menjadi Adipati Lamongan yang pertama bukanlah Sultan Pajang, melainkan Kanjeng Sunan Giri IV. Hal itu disebabkan Kanjeng Sunan Giri prihatin terhadap Kasultanan Pajang yang selalu resah dan situasi pemerintahan yang kurang mantap. Disamping itu Kanjeng Sunan Giri juga merasa prihatin dengan adanya ancaman dan ulah para pedagang asing dari Eropa yaitu orang Portugis yang ingin menguasai Nusantara khususnya Pulau Jawa. Tumenggung Surajaya adalah RanggaHadi yang berasal dari dusun Cancing yang sekarang termasuk wilayah Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan. Sejak masih muda Hadi sudah nyuwito di Kasunanan Giri

dan menjadi seorang santri yang dikasihi oleh Kanjeng Sunan Giri karena sifatnya yang baik, pemuda yang trampil, cakap dan cepat menguasai ajaran agama Islam serta seluk beluk pemerintahan. Disebabkan pertimbangan itu akhirnya Sunan Giri menunjuk Hadi untuk melaksanakan perintah menyebarkan Agama Islam dan sekaligus mengatur pemerintahan dan kehidupan Rakyat di Kawasan yang terletak di sebelah barat Kasunanan Giri yang bernama Kenduruan. Untuk melaksanakan tugas berat tersebut Sunan Giri memberikan Pangkat Ranga kepada Hadi. Ringkasnya sejarah, Ranga Hadi dengan segenap pengikutnya dengan naik perahu melalui Kali Lamong, akhirnya dapat menemukan tempat yang bernama Kenduruan itu. Adapun kawasan yang disebut Kenduruan tersebut sampai sekarang masih ada dan tetap bernama Kenduruan, berstatus Kampung di Kelurahan Sidokumpul wilayah Kecamatan Lamongan. Di daerah baru tersebut ternyata semua usaha dan rencana Ranga Hadi dapat berjalan dengan mudah dan lancar, terutama di dalam usaha menyebarkan agama Islam, mengatur pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Pesantren untuk menyebar Agama Islam peninggalan Ranga Hadi sampai sekarang masih ada. Kondisi geografis dan demografis Geografis Secara geografis Kabupaten Lamongan terletak pada 651'54" - 723'06" Lintang Selatan dan 11233'45" - 11233'45" Bujur Timur. Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah kurang lebih 1.812,8 km² atau +3.78% dari luas wilayah Propinsi Jawa Timur. Dengan panjang garis pantai sepanjang 47 km, maka wilayah perairan laut Kabupaten Lamongan adalah seluas 902,4 km², apabila dihitung 12 mil dari permukaan laut. Daratan Kabupaten Lamongan dibelah oleh Sungai Bengawan Solo, dan secara garis besar daratannya dibedakan menjadi 3 karakteristik yaitu: Bagian Tengah Selatan merupakan daratan rendah yang relatif agak subur yang

membentang dari Kecamatan Kedungpring, Babat, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung, Sugio, Maduran, Sarirejo dan Kembangbahu. Bagian Selatan dan Utara merupakan pegunungan kapur berbatu-batu dengan kesuburan sedang. Kawasan ini terdiri dari Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran, dan Solokuro. Bagian Tengah Utara merupakan daerah Bonorowo yang merupakan daerah rawan banjir. Kawasan ini meliputi kecamatan Sekaran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinangun, Glagah. Dulu Lamongan merupakan Pintu Gerbang ke Kerajaan Kahuripan, Kerajaan Panjalu, Kerajaan Jenggala, Kerajaan Singosari atau Kerajaan Mojopahit, berada di Ujung Galuh, Canggus dan Kambang Putih (Tuban). Setelah itu tumbuh pelabuhan Sedayu Lawas dan Gujaratan (Gresik), merupakan daerah amat ramai, sebagai penyambung hubungan dengan Kerajaan luar Jawa bahkan luar Negeri. Zaman Kerajaan Medang Kamulan di Jawa Timur, Di Lamongan berkembang Kerajaan kecil Malawapati (kini dusun Melawan desa Kedung Wangi kecamatan Sambeng) dipimpin Raja Agung Angling darma dibantu Patih Sakti Batik Maadrim termasuk kawasan Bojonegoro kuno. Saat ini masih tersimpan dengan baik, Sumping dan Baju Angling darma didusun tersebut. Di sebelah barat berdiri Kerajaan Rajekwesi di dekat kota Bojonegoro sekarang. Pada waktu Kerajaan Majapahit dipimpin Raja Hayam Wuruk (1350 -1389) kawasan kanan kiri Bengawan Solo menjadi daerah Pardikan. Merupakan daerah penyangga ekonomi Mojopahit dan jalan menuju pelabuhan Kambang Putih. Wilayah ini disebut Daerah Swatantra Pamotan dibawah kendali Bhre Pamotan atau Sri Baduga Bhrameswara paman Raja Hayam Wuruk (Petilasan desa Pamotan kecamatan Sambeng), sebelumnya. Di bawah kendali Bhre Wengker (Ponorogo). Daerah swatantra

Pamotan meliputi 3 kawasan pemerintahan Akuwu , meliputi Daerah Biluluk (Bluluk) Daerah Tenggulunan (Tenggulun Solokuro) , dan daerah Pepadhangnan (Padangan Bojonegoro). Menurut buku Negara Kertagama telah berdiri pusat pengkaderan para cantrik yang mondok di Wonosrama Budha Syiwa bertempat di Balwa (desa Blawi Karangbinangun) , di Pacira (Sendang Duwur Paciran), di Klupang (Lopang Kembangbahu) dan di Luwansa (desa Lawak Ngimbang). Desa Babat kecamatan Babat ditengarahi terjadi perang Bubat, sebab saat itu babat salah satu tempat penyeberangan diantar 42 tempat sepanjang aliran bengawan Solo. Berita ini terdapat dalam Prasasti Biluluk yang tersimpan di Musium Gajah Jakarta, berupa lempengan tembaga serta 39 gurit di Lamongan yang tersebar di Pegunungan Kendeng bagian Timur dan beberapa tempat lainnya. Menjelang keruntuhan Mojopahit tahun 1478M, Lamongan saat itu dibawah kekuasaan Keerajaan Sengguruh (Singosari) bergantian dengan Kerajaan Kertosono (Nganjuk) dikenal dengan kawasan Gunung Kendeng Wetan diperintah oleh Demung, bertempat disekitar Candi Budha Syiwa di Mantup. Setelah itu diperintah Rakrian Rangga samapi 1542M (petilasan di Mushalla KH.M.Mastoer Asnawi krangan kota Lamongan). Kekuasaan Mojopahit di bawah kendali Ario Jimbun (Ariajaya) anak Prabu Brawijaya V di Galgahwangi yang berganti Demak Bintoro bergelar Sultan Alam Akbar Al Fatah (Raden Patah) 1500 – 1518, lalu diganti anaknya, Adipati Unus 1518 -1521 M , Sultan Trenggono 1521 – 1546 M. Dalam mengembangkan ambisinya, sultan Trenggono mengutus Sunan Gunung Jati (Fatahilah) ke wilayah barat untuk menaklukkan Banten, Jayakarta, danCirebon. Ke timur langsung dipimpin Sultan sendiri menyerbu Lasem, Tuban dan Surabaya sebelum menyerang Kerajaan Blambangan (Panarukan). Pada saat menaklukkan

Surabaya dan sekitarnya, pemerintahan Rakryan Ranga Kali Segunting (Lamong), ditaklukkan sendiri oleh Sultan Trenggono 1541 . Namun tahun 1542 terjadi pertempuran hebat antara pasukan Rakkryan Kali Segunting dibantu Kerajaan sengguruh (Singosari) dan Kerajaan Kertosono Nganjuk dibawah pimpinan Ki Ageng Angsa dan Ki Ageng Panuluh, mampu ditaklukkan pasukan Kesultanan Demak dipimpin Raden Abu Amin, Panji Laras, Panji Liris. Pertempuran sengit terjadi didaerah Bandung, Kalibumbung, Tambakboyo dan sekitarnya. Setelah Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945, daerah Lamongan menjadi daerah garis depan melawan tentara pendudukan Belanda, perencanaan serangan 10 Nopember Surabaya juga dilakukan Bung Tomo dengan mengunjungi dulu Kyai Lamongan dengan pekikan khas pembakar semangat Allahu Akbar. Lamongan yang dulunya daerah miskin dan langganan banjir, berangsur-angsur bangkit menjadi daerah makmur dan menjadi rujukan daerah lain dalam pengentasan banjir. Dulu ada pameo “ Wong Lamongan nek rendeng gak iso ndodok, nek ketigo gak iso cewok “ tapi kini diatasi dengan semboyan dari Sunan Drajat, Derajate para Sunan dan Kyai “ Memayu Raharjaning Praja “ yang benar –benar dilakukan dengan perubahan mendasar, dalam memsejahterahkan rakyatnya masih memegang budaya kebersamaan saling membantu sesuai pesan kanjeng Sunan Drajat “ Menehono mangan marang wong kangluwe, menehono payung marang wong kang kudan , menehono teken marang wong kang wutho, menehono busaono marang wong kang wudho “ Kabupaten Lamongan melejit bagaikan Sulapan , dengan terobosannya yang menjadi perbincangan Nasional. Yang menonjol selama ini menjadi Ikon Wisata Bahari Lamongan (Lamongan Ocean Tourism Ressort) , Lamongan Integrated Sharebased, Proyek Pelabuhan Rakyat, dan Proyek Lapangan Terbang

dan Eksplorasi minyak Balong Wangi Sarirejo, memungkinkan datangnya investasi baik dari dalam negeri maupun investor luar negeri. Dengan tangan dingin Bupati, PKL ditata rapi, Kelancaran jalan desa dan pengairan ditata sedemikian rupa, termasuk memberikan Bea siswa bagi siswa dan mahasiswa berprestasi yang ekonominya kurang beruntung, dan nantinya jika telah menyelesaikan studynya bisa kembali dan menyumbangkan pikiran dan kemampuannya demi kemajuan Lamongan. Kegiatan HJL kali ini juga dumeriahkan oleh Dewan Kesenian Lamongan (DKL) parade Teater dan Pameran Senirupa kerja sama dengan STKW Surabaya di gedung Handayani dilanjutkan Sarasehan seni rupa oleh Agus Koecing Surabaya , mengusung Peran dan perkembangan seni rupa jawa timur dan Management berkesenian Kali ini, usai ziarah dan tabur bunga di Makam Mbah Lamong (Tumenggung Surajaya), Mbah Punuk dan Mbah Sabilan di kawasan kota, juga mengunjungi makam sesepuh di Dusun Cancing Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang. Di desa ini, terdapat makam dari Nyi Andong Sari yang diyakini sebagai ibunda dari Mahapatih Gajah Mada. Di desa ini pula, diyakini sebagai tempat kelahiran Hadi, yang kelak dilantik oleh Sunan Giri IV menjadi Adipati Lamongan yang pertama dengan gelar Tumenggung Surajaya pada 10 Dzulhijjah 976 Hijriyah atau bertepatan dengan Kamis Pahing tanggal 26 Mei 1569 Masehi. Untuk menuju ke makam Nyai Andongsari yang dipercaya sebagai makam Ibunda Mahapatih Gajah Mada tersebut, harus melewati tangga undakan. Makam yang kini sudah direhab Pemkab Lamongan dan difungsikan sebagai Peninggalan Situs Bersejarah sekaligus tempat Wisata sejarah ini setiap hari dikelola dan dirawat oleh seorang juru kunci makam. Makam ini menurut sang juru kunci merupakan bukti fisik akan keberadaan asal usul Gajah Mada. Gunung atau biasa juga disebut bukit

Ratu tempat Nyai Andongsari dimakamkan. Dulunya merupakan petilasan dari Dewi Andong Sari yang diusir dari Majapahit, karena iri hati dari permaisuri Dara Petak dan Dara Jingga karena khawatir memiliki seorang putra. Di bukit inilah tempat Dewi Andongsari menjalani hari-harinya sampai akhirnya melahirkan Joko Modo atau yang kemudian dikenal sebagai Gajah Mada. Di masa mudanya, Gajah Mada besar di daerah ini yang kemudian mengabdikan ke Majapahit hingga akhirnya menjabat sebagai mahapatih. Di daerah Lamongan selatan sendiri memang banyak sekali cerita rakyat yang berkembang tentang asal usul Gajahmada tersebut. Sifat orang Lamongan mengutamakan kebersamaan, suka berjuang, ulet berkerja, agamis, terbuka, halus, perasaan, jujur, penuh tanggung jawab, dan petualang (bangga kan jadi orang Lamongan?). Namun, kadang kala kaku dan kasar bila tidak diajak musyawarah, suka merantau, berani membela sebuah kejujuran, tidak garang, dan suka membantu (ehem). Bahasa orang Lamongan adalah bahasa pesisir yang lugas penuh dialek Osing, Madura, Jawa Ngoko, diwarnai budaya Arek atau Bocah.

2. ISI

"Terwujudnya Lamongan lebih Sejahtera dan Berdaya Saing"

Makna dari visi tersebut adalah adanya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder's dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif.

3. MISI

"Mengembangkan Perekonomian yang Berdaya Saing dengan Mengoptimalkan Potensi Daerah"

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan maka terdapat 5 misi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan. Dinas Perikanan berperan dalam mewujudkan misi yang ke-2.

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, perhubungan, permukiman, air bersih, serta sarana penunjang produksi barang dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang akses perekonomian.

4. TUJUAN

“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah dan Ekonomi Kerakyatan untuk Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Masyarakat”

4.2 Deskripsi Karakteristik Responden

Karakteristik responden dari penelitian ini yaitu penyedia/peserta tender tahun 2020 di Pemkab Lamongan dan merupakan pengguna *e-procurement*. Selain itu, karakteristik responden pada penelitian ini juga terdapat identitas dari responden yang meliputi jenis kelamin, usia, lama berdirinya jasa, omset tahunan. Hasil analisis dari hal-hal tersebut telah disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini:

1. Jenis Kelamin

Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4. 1**Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
Laki-laki	173	63
Perempuan	103	37
Jumlah	276	100

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa responden terbanyak adalah responden berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 173 responden dengan persentase 63 % dan 103 responden perempuan dengan persentase 37%.

2. Usia

Deskripsi responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4. 2**Karakteristik responden berdasarkan usia**

Usia	Jumlah Responden	Persentase
24-29	164	59
30-45	112	41
Jumlah	276	100

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa responden terbanyak adalah responden yang berusia 24-29 tahun yaitu sebanyak 164 responden dengan persentase 59%.

3. Lama Usaha

Deskripsi responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4. 3**Karakteristik Responden berdasarkan Lama usaha**

Lama Usaha	Jumlah Responden	Persentase
1-5 Tahun	144	52
> 5 Tahun	132	48
Jumlah	276	100

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat jika responden terbanyak adalah responden yang memiliki usaha selama 1-5 tahun yaitu sebanyak 144 responden dengan persentase 52%

4. Omset Tahunan

Deskripsi responden berdasarkan omset tahunan dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4. 4**Karakteristik responden berdasarkan omset tahunan**

Omset Tahunan	Jumlah Responden	Persentase
<10 juta- 25 juta	144	52
> 25 juta	132	48
Jumlah	276	100

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat jika responden terbanyak adalah responden yang memiliki omset tahunan <10 juta- 25 juta yaitu sebanyak 144 responden dengan persentase sebesar 52%.

4.3 Deskripsi Jawaban Responden

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini berupa data primer yang menggunakan skala *likert* dibuat dalam bentuk pilihan ganda. Sugiyono (2011)

menyatakan jika skala *likert* merupakan skala yang berisi lima tingkatan prefensi jawaban dengan rincian sebagai berikut: 1) jawaban poin SS, dengan skor 5 berarti Sangat Setuju; 2) jawaban poin S, dengan skor 4 berarti Setuju, 3) jawaban poin KS, dengan skor 3 berarti Kurang Setuju; 4) jawaban poin TS, dengan skor 2 berarti Tidak Setuju; 5) jawaban poin STS, dengan skor 1 berarti sangat Tidak Setuju. Langkah-langkah dalam menentukan tanggapan responden sebagai berikut:

Skor tertinggi-skor terendah

$$(5 \times 276) - (1 \times 276) = 1.380 - 276 = 1.104$$

$$P = 1.104 / 5 = 220,8 \text{ Dibulatkan menjadi } 221$$

Tabel 4. 5

Tanggapan Responden

No	Skala	Kriteria
1	1.164-1.385	Sangat Setuju
2	942-1.163	Setuju
3	720-941	Kurang Setuju
4	498-719	Tidak Setuju
5	276-497	Sangat Tidak Setuju

Sumber: Data diolah, 2021

4.3.1 E-Procurement (X1)

E-Procurement (X1) diukur berdasarkan penilaian responden terhadap beberapa indikiator. Berikut ini hasil tanggapan responden berdasarkan kuesioner yang didistribusikan kepada 276 responden dan telah diolah sesuai dengan tabel 4.6.

Tabel 4. 6

Tanggapan dan Penilaian Responden tentang E-procurement

Indikator	Item Pernyataan	Jawaban Responden					Mean Item	Mean Indikator
		SS	S	KS	TS	STS		
Kuantitas (X1.1)	Menggunakan E-procurement dapat menghemat biaya pengadaan	98	89	89	0	0	4.03	4.21
	Penyedia tidak perlu stok barang terlalu banyak	98	89	89	0	0	4.03	
	Implementasi e-procurement memudahkan dalam perencanaan dan pengendalian pengadaan barang dan jasa	182	69	25	0	0	4.57	
Kualitas (X1.2)	Mempererat hubungan dengan supplier	98	89	89	0	0	4.03	3.71
	Meningkatkan kepuasan user	98	89	89	0	0	4.03	
	Mengurangi biaya transaksi karena mengurangi penggunaan telfon, fax dan dokumen-dokumen yang menggunakan kertas	34	16	164	62	0	3.08	
Ketepatan Waktu (X1.3)	Mengurangi waktu pemesanan barang	98	89	89	0	0	4.03	4.21
	Meningkatkan efisiensi dalam proses pengadaan proses aplikasi yang lebih cepat	98	89	89	0	0	4.03	
	Penyedia tepat waktu dalam memasukkan dokumen-dokumen	182	69	25	0	0	4.57	

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai rata-rata tertinggi tanggapan responden sebesar 4,21 ditunjukkan oleh 2 indikator yaitu kuantitas dan ketepatan waktu hal ini menunjukkan jika E-Procurement dipilih oleh responden karena memiliki skor maksimal 5. Sedangkan nilai rata-rata terendah tanggapan responden sebesar 3,71 ditunjukkan oleh

indikator kualitas yang menunjukkan jika kualitas dari E-procurement yang ditawarkan belum sepenuhnya maksimal.

4.3.2 *Fraud* (Y1)

Fraud (Y1) diukur berdasarkan penilaian berdasarkan penilaian responden terhadap beberapa indikator. Berikut ini hasil tanggapan responden berdasarkan kuesioner yang didistribusikan kepada 276 responden dan telah diolah sesuai dengan tabel 4.7.

Tabel 4. 7

Tanggapan dan Penilaian Responden tentang *Fraud*

Indikator	Item Pernyataan	Jawaban Responden					Mean Item	Mean Indikator
		SS	S	KS	TS	STS		
Korupsi (Y1.1)	Prosedur pelayanan yang ditetapkan sudah memadai dan tidak berpotensi menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)	35	16	164	61	0	3.09	3.77
	Adanya petugas pelayanan yang bertindak diskriminatif	95	92	89	0	0	4.02	
	Petugas pelayanan tidak memberikan pelayanan di luar prosedur yang telah ditetapkan dengan imbalan uang/barang	107	139	17	3	10	4.20	
Penyalahgunaan Asset (Y1.2)	Dengan adanya pengawasan dapat membantu mengatasi tindakan kecurangan yang dilakukan pegawai	34	16	164	62	0	3.08	3.71
	Hanya pihak internal yang mengerti lika-liku pembuatan laporan keuangan	98	89	89	0	0	4.03	
	Hanya pihak internal yang mengetahui dan memahami isi dan angka laporan keuangan yang selesai dikerjakan	95	92	89	0	0	4.02	

Laporan yang Dimanipulasi (Y1.3)	Adanya suatu tujuan tertentu, biaya dicatat lebih besar dari semestinya	183	66	27	0	0	4.57	4.2
	Suatu masalah apabila pencatatan bukti transaksi dilakukan tanpa otorisasi dari pihak yang berwenang	95	92	89	0	0	4.02	
	Tidak menjadi suatu masalah apabila suatu transaksi tidak memiliki bukti pendukung ganda	95	92	89	0	0	4.02	

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan nilai rata-rata tertinggi tanggapan responden pada variabel *fraud* sebesar 4,20 yang ditunjukkan oleh indikator laporan yang dimanipulasi, sedangkan nilai rata-rata terendah tanggapan responden sebesar 3,71 yang ditunjukkan oleh penyalahgunaan aset .

4.3.3 Good Governance (Y2)

Good Governance (Y2) diukur berdasarkan penilaian berdasarkan penilaian responden terhadap beberapa indikiator. Berikut ini hasil tanggapan responden berdasarkan kuesioner yang didistribusikan kepada 276 responden dan telah diolah sesuai dengan tabel 4.8

Tabel 4. 8

Tanggapan dan Penilaian Responden tentang *Good Governance*

Indikator	Item Pernyataan	Jawaban Responden					Mean Item	Mean Indikator
		SS	S	KS	TS	STS		
Transparansi (Y2.1)	Pemerintah sudah menyelenggarakan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik).	107	139	17	3	10	4.20	3.83
	Tidak adanya keterbukaan pemerintah kabupaten akan menciptakan tata	34	16	164	62	0	3.08	

	kelola pemerintahan yang baik.							
	Laporan akuntabilitas telah dipublikasikan secara bebas dapat diakses oleh masyarakat luas.	98	89	89	0	0	4.03	
	Informasi yang tersedia dapat dimengerti merupakan perwujudan nyata dari transparansi pemerintah.	98	89	89	0	0	4.03	
Partisipasi (Y2.2)	Upaya membentuk panitia pengadaan yang kompeten	182	69	25	0	0	4.57	4.21
	Data dan informasi pengadaan barang dan jasa dapat diperoleh oleh peserta tersebut demi kepentingan bersama	98	89	89	0	0	4.03	
	Dalam menyusun pengadaan dan tahapan dilakukan secara tertib, aman, dan terbuka	98	89	89	0	0	4.03	
Akuntabilitas (Y2.3)	Upaya membentuk komite audit	182	69	25	0	0	4.57	4.21
	Upaya membentuk dan menetapkan kembali peran dan fungsi auditor internal terkait pengadaan barang dan jasa	98	89	89	0	0	4.03	
	Upaya menetapkan sistem penilaian kerja pengadaan terkait pengadaan barang dan jasa	98	89	89	0	0	4.03	

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan nilai rata-rata tertinggi tanggapan responden pada variabel *Good Governance* sebesar 4,21 yang ditunjukkan oleh indikator partisipasi dan akuntabilitas, sedangkan nilai rata-rata terendah tanggapan responden sebesar 3,83 yang ditunjukkan oleh transparansi.

4.4 Hasil Analisis Data

4.4.1 Uji Validitas

Uji validitas pada penelitian ini menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data penelitian. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuisisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut. Dalam uji validitas isi suatu butir pernyataan atau variabel dinyatakan valid jika r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} . Berikut ini hasil dari pengamatan kuesioner tentang uji validitas diambil dari data yang diolah melalui software SPSS *for windows* versi 24.0, hasil dari data yang sudah diolah sudah tampak seperti pada tabel 4.9 dibawah ini:

Tabel 4. 9

Rekapitulasi hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian

No	Butir Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Sig.	Keterangan
1	X				
	X1.1	0,956	0,113	0,000	Valid
	X1.2	0,956	0,113	0,000	Valid
	X1.3	0,356	0,113	0,000	Valid
	X1.4	0,956	0,113	0,000	Valid
	X1.5	0,956	0,113	0,000	Valid
	X1.6	0,180	0,113	0,000	Valid
	X1.7	0,956	0,113	0,000	Valid
	X1.8	0,956	0,113	0,000	Valid
	X1.9	0,356	0,113	0,000	Valid
2	Y1				
	Y1.1	0,169	0,113	0,000	Valid
	Y1.2	0,866	0,113	0,000	Valid
	Y1.3	0,255	0,113	0,000	Valid
	Y1.4	0,234	0,113	0,000	Valid
	Y1.5	0,154	0,113	0,000	Valid
	Y1.6	0,866	0,113	0,000	Valid
	Y1.7	0,291	0,113	0,000	Valid

	Y1.8	0,866	0,113	0,000	Valid
	Y1.9	0,866	0,113	0,000	Valid
3	Y2				
	Y2.1	0,164	0,113	0,000	Valid
	Y2.2	0,194	0,113	0,000	Valid
	Y2.3	0,938	0,113	0,000	Valid
	Y2.4	0,938	0,113	0,000	Valid
	Y2.5	0,362	0,113	0,000	Valid
	Y2.6	0,938	0,113	0,000	Valid
	Y2.7	0,938	0,113	0,000	Valid
	Y2.8	0,362	0,113	0,000	Valid
	Y2.9	0,938	0,113	0,000	Valid
	Y2.10	0,938	0,113	0,000	Valid

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.9 diatas hasil dari uji validitas instrumen semua variabel didapatkan r hitung $> r_{\text{tabel}}$ 0,113. Jadi seluruh butir pernyataan / indikator dari variabel independen maupun dependen terbukti valid dan mampu menjelaskan variabel independen maupun dependen tersebut.

4.4.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas dikatakan reabilitas apabila memiliki nilai Cronbach Alpha $> 0,60$ (Ghozali, 2016). Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dengan software SPSS for windows versi 24.0, pengujian reabilitas pada penelitian ini ditunjukkan pada table 4.10 berikut:

Tabel 4. 10

Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Item	Cronbach Alpha	Alpha	Keterangan
E-Procurement (X)	0,901	0,60	Reliabel
Fraud (Y1)	0,631	0,60	Reliabel
Good Governance (Y2)	0,886	0,60	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa masing-masing variabel nilai nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60. Dengan

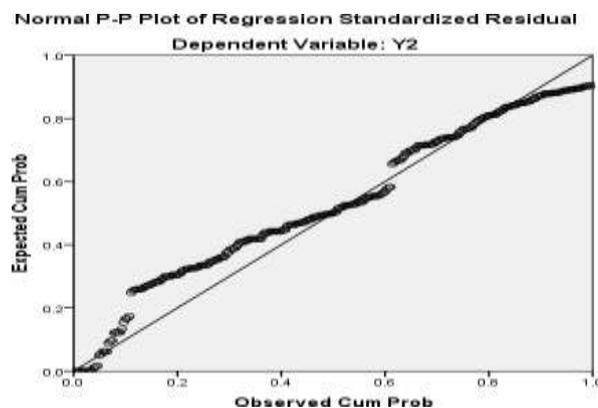
demikian dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel dan konsistensi indikator bisa digunakan pada waktu yang berbeda.

4.4.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis grafik dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan menurut Ghozali (2013) yaitu: 1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas; 2) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dengan *software SPSS for windows* versi 24.0, pengujian normalitas pada penelitian ini ditunjukkan pada gambar 4.2 berikut:

Gambar 4. 2 Hasil Uji Normalitas



Pada gambar 4.2 menunjukkan bahwa grafik Normal *P-P Plot of Regression Standardized Residual* menggambarkan penyebaran data disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal grafik tersebut, maka model regresi yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolineritas dalam penelitian ini dengan menggunakan dasar pengambilan keputusan, Jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* (TOL) tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolineritas (Ghozali, 2016). Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dengan software *SPSS for windows* versi 24.0, pengujian multikolineritas pada penelitian ini ditunjukkan pada tabel 4.11 berikut:

Tabel 4. 11
Hasil Uji Multikolinieritas

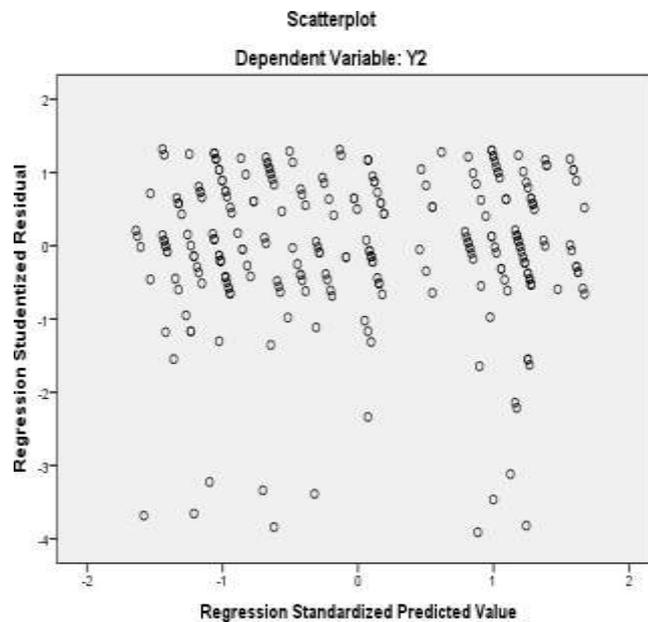
Variabel	Tolerance Value	VIF	Keterangan
E-Procurement (X)	0.960	1.041	Nonmultikolinearitas
Fraud (Y1)	0.960	1.041	Nonmultikolinearitas

Berdasarkan tabel 4.11 hasil dari pengelolaan data diperoleh nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali,2013). Berikut ini tampilan grafik Scatterplot dari model regresi dalam penelitian ini disajikan pada gambar 4.3

Gambar 4. 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Dalam suatu model regresi yang baik, biasanya tidak mengalami heteroskedastisitas. Melalui grafik scatterplot dapat terlihat suatu model regresi mengalami heteroskedastisitas atau

tidak. Jika terdapat pola tertentu dalam grafik maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Dari Gambar 4.3 terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini.

4.4.4 Uji Regresi Sederhana

1. Uji Koefisien Regresi Sederhana (Uji t)

Tabel 4. 12
Hasil Koefisien Regresi Sederhana (Uji t)

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	29.982	1.521		19.714	.000
	X	.139	.041	.199	3.369	.001

a. Dependent Variable: Y1

Sumber: Output SPSS, 2021

Dari tabel diatas, maka dapat diperoleh model persamaan pertama sebagai berikut:

$$\text{Fraud} = 0,139 X + 0,05$$

Bersamaan persamaan regresi, menunjukkan bahwa variabel *E-Procurement* (X) mempunyai arah koefisien regresi yang positif atau berbanding lurus terhadap motivasi, hal ini menunjukkan bahwa variabel *E-Procurement* (X) akan memberikan pengaruh positif terhadap motivasi.

Hasil Uji Koefisien Regresi Sederhana (Uji t) adalah sebagai berikut:

a. Pengaruh *E-Procurement* terhadap *fraud*

1) Hipotesis

$H_0 : H_1 = 0$ Tidak ada pengaruh *E-Procurement* terhadap *fraud*

$H_0 : H_1 = 0$ Tidak ada pengaruh *E-Procurement* terhadap *fraud*

$H_0 : H_1 \neq 0$ *E-Procurement* mempunyai pengaruh terhadap *fraud*

2) Kriteria

Jika $P_{\text{value}} > \alpha = H_0$ diterima, artinya tidak terdapat pengaruh antara *E-Procurement* terhadap *fraud*

Jika $P_{\text{value}} \leq \alpha = H_0$ ditolak, artinya terdapat pengaruh antara *E-Procurement* terhadap *fraud*

3) Hasil

Pada tabel 4.12 menunjukkan *p-value* hasil uji *-t* dari variabel *E-Procurement* sebesar 0,001. Dikarenakan nilai *p-value* lebih kecil dari tingkat signifikan $\alpha = 5\%$ atau ($0.001 < 0.05$), maka H_0 ditolak yang berarti *E-Procurement* mempunyai pengaruh terhadap *fraud*.

2. Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4. 13
Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.988 ^a	.975	.975

Berdasarkan tabel 4.13 dapat diketahui besarnya koefisien determinasi R^2 sebesar 0,975. Hasil tersebut dapat diartikan jika 97,5%

variabel good governance dipengaruhi oleh *E-Procurement* dan *Fraud* sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar model penelitian.

4.4.5 Analisis Jalur (Path Analysis)

Penelitian ini menggunakan analisis statistik yaitu analisis jalur (Path Analysis). Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh variable intervening (Y1) dimana penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variable (model casual). Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linier berganda atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori. Hubungan langsung terjadi jika satu variabel mempengaruhi variabel lainnya tanpa ada variabel ketiga yang memediasi (intervening) hubungan kedua variabel tersebut. Hubungan tidak langsung adalah jika ada variabel ketiga yang memediasi hubungan kedua variabel ini (Ghozali, 2005). Dengan demikian dalam model hubungan antar variabel tersebut, terdapat variabel independen yang dalam hal ini disebut variabel eksogen (exogenous), dan variabel dependen yang disebut variabel endogen (endogenous). Melalui analisis jalur ini akan dapat ditemukan jalur mana yang paling tepat dan singkat suatu variabel independen menuju variabel dependen yang terakhir (Sugiyono, 2010).

a) Pengaruh *E-Procurement* (X) terhadap *Fraud* (Y₁)

Tabel 4. 14
Rekapitulasi Analisis antara X terhadap Y₁

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	29.982		1.521		19.714	.000
X	.139		.041	.199	3.369	.001
Dependent Variable: Y1						
R : 0,199						
R square (R2) : 0,040						
Adjust R square : 0,036						
F hitung : 11,347						
Sig F : 0,001						

Sumber: Lampiran *Output* SPSS

Adapun pengujian secara parsial dari variabel bebas adalah sebagai berikut:

Pengaruh variabel *E- Procurement* (X) terhadap *fraud* (Y₁). Dari hasil perhitungan secara parsial variabel *E-Procurement* (X) mempunyai pengaruh yang positif terhadap *fraud* pada tingkat kesalahan 0,05 ($\alpha = 5\%$) apabila variabel lain diasumsikan konstan. Hal ini dapat dibuktikan dengan besarnya koefisien path sebesar 0,199 dengan nilai signifikan t sebesar 0,001 ($0,001 < 0,05$) maka secara parsial variabel *E-Procurement* (X) berpengaruh terhadap *fraud* (Y₁). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama diterima.

Besarnya sumbangan variabel *E-Procurement* terhadap *fraud* dapat dilihat dari nilai Adjusted R square yaitu sebesar 0,036 hal ini

menunjukkan 36% variabel *E-Procurement* akan dipengaruhi variabel bebasnya yaitu *fraud*. Sedangkan sisanya 64% variabel *E-Procurement* akan dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dibahas pada penelitian ini.

b) Pengaruh *E-Procurement* dan *Fraud* (Y_1) terhadap *Good Governance* (Y_2)

Tabel 4. 15
Rekapitulasi Analisis antara X dan Y_1 terhadap Y_2

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.303	.553		4.164	.000
X	.991	.010	.978	100.512	.000
Y_1	.063	.014	.043	4.460	.000
Dependent Variable: Y_2					
R	: 0,988				
R square (R2)	: 0,975				
Adjust R square	: 0,975				
F hitung	: 5363,9				
Sig F	: 0,000				

Sumber: Lampiran *Output* SPSS

Berdasarkan tabel 4.15 dapat diketahui pengaruh yang signifikan antara variabel *E-Procurement* dan *fraud* terhadap *good governance*. Dari hasil uji koefisien path pada tabel 4.15 didapatkan nilai signifikan F sebesar 0,000 ($\text{sig.F} < 0,05$ sehingga H_0 ditolak karena H_0 ditolak maka hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh secara bersama-sama antara *E-Procurement* dan *fraud* terhadap *good governance* dapat diterima.

Adapun pengujian parsial masing-masing variabel bebas adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh variabel *E-Procurement* (X) terhadap *good governance* (Y₂). Dari perhitungan secara parsial variabel *E-Procurement* (X) mempunyai pengaruh terhadap *good governance* (Y₂) pada tingkat kesalahan 0,05 ($\alpha = 5\%$) apabila variabel lain diasumsikan konstan. Hal ini dapat dibuktikan dengan dengan besarnya koefisien path sebesar 0,991 dengan nilai sig t sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$) maka secara parsial variabel *E-Procurement* (X) berpengaruh terhadap *good governance* (Y₂). Hal ini menunjukkan jika hipotesis kedua diterima.
2. Pengaruh variabel *fraud* (Y₁) terhadap *good governance* (Y₂). Dari perhitungan secara parsial variabel *fraud* (Y₁) mempunyai pengaruh terhadap *good governance* (Y₂) pada tingkat kesalahan 0,05 ($\alpha = 5\%$) apabila variabel lain diasumsikan konstan. Hal ini dapat dibuktikan dengan besarnya koefisien path sebesar 0,063 dengan nilai sig t sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$) maka secara parsial variabel *fraud* (Y₁) berpengaruh terhadap *good governance* (Y₂). Hal ini menunjukkan jika hipotesis ketiga diterima.

Besarnya sumbangan variabel *E-Procurement* (X) dan *Fraud* (Y₁) terhadap *Good Governance* (Y₂) dapat dilihat dari nilai Adjusted R square yaitu sebesar 0,975 yang berarti bahwa 97,5% variabel *good governance* akan dipengaruhi oleh variabel bebasnya yaitu *E-*

Procurement dan *fraud* sedangkan sisanya 2,5% variabel *good governance* akan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas pada penelitian ini.

c) Pengaruh Secara Tidak Langsung

Berdasarkan analisis jalur yang signifikan dapat diketahui pengaruh secara tidak langsung antara variabel bebas terhadap variabel Y_2 melalui Y_1 sebagai berikut:

Langkah 1

Direct effect $X - Y_2 = 0,991$

Indirect effect $X - Y_1 - Y_2 = (P_2 \times P_3) = (0,139 \times 0,063) = 0,0087$

$B = 0,0087$

Langkah 2

Menghitung standar error koefisien indirect effect

Rumus:

$$S_{ab} = \sqrt{b^2 s_a^2 + a^2 s_b^2 + s_a^2 s_b^2}$$

$$S_{ab} = \sqrt{0,063^2 \cdot 0,041^2 + 0,139^2 \cdot 0,014^2 + 0,041^2 \cdot 0,014^2}$$

$$S_{ab} = \sqrt{0,004 \cdot 0,002 + 0,019 \cdot 0,002 + 0,002 \cdot 0,0002}$$

$$S_{ab} = \sqrt{0,000008 + 0,0000038 + 4,0000000}$$

$$S_{ab} = \sqrt{4} = 2$$

Langkah 3

Menghitung nilai t statistik

$$t = \frac{ab}{s_{ab}}$$

$$t = \frac{0,0087}{2} = 0,00435$$

Nilai pada t, kemudian dibandingkan dengan t tabel sesuai dengan sampel/t tabel umum. Menurut Ghozali (2015) taraf sig = 0,05 dimana memiliki nilai t tabel 1,96. Hasil pengaruh tidak langsung X- Y1 –Y2 adalah tidak signifikan dan positif karena nilai t hitung < daripada t tabel dengan beta 0,0087.

$$\begin{aligned} \text{Untuk mencari beta standardized} &= (p2 \times p3) = (0,199 \times 0,043) \\ &= 0,0086 \end{aligned}$$

Langkah 4

Membuat tabel koefisien

Tabel 4. 16

Hasil Uji Pengaruh Variabel Mediasi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Keterangan
	B	Std. Error	Beta		
X -Y ₁ - Y ₂	0,087	2	0,0086	0,00435	Non.Sign

Sumber: Hasil Perhitungan, 2021

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel fraud memiliki t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu 0,00435 maka dapat disimpulkan bahwa koefisien mediasi tidak signifikan yang berarti tidak terdapat pengaruh mediasi. Hasil pengujian hipotesis ke empat penelitian ini yaitu pengaruh tidak langsung antara *E-procurement* terhadap *good governance* melalui *fraud*.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *E-procurement* berpengaruh langsung terhadap *good governance* dan tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap *good governance* melalui *fraud*. Hal ini

menjelaskan jika *fraud* tidak dapat menjelaskan hubungan tidak langsung antara *E-procurement* dan *good governance*.

Dari penjelasan diatas, maka hipotesis ke empat dari penelitian ini ditolak dengan asumsi bahwa *E-procurement* tidak berpengaruh terhadap *good governance* melalui *fraud*.

4.5 Pembahasan

1. Pengaruh *E-Procurement* (X) terhadap *Fraud*.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh langsung antara *E-Procurement* (X) terhadap *Fraud* (Y_1) dengan nilai besarnya koefisien path sebesar 0,199 dengan nilai signifikan t sebesar 0,001 ($0,001 < 0,05$) maka secara parsial variabel *E-Procurement* (X) berpengaruh terhadap *fraud* (Y_1). Temuan penelitian ini mengkonfirmasi teori yang disampaikan oleh Dwiyanto dkk (2012) yang menyampaikan bahwa ide reformasi menginginkan birokrasi yang lebih transparan, terbuka dan jujur. Aktivitas serta proses tahap perencanaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip reformasi birokrasi secara nyata dapat mencegah timbulnya praktik-praktik kecurangan. Hal ini dapat dicontohkan dengan persiapan secara transparan serta terperinci mengenai waktu, target, mutu, biaya serta manfaat dari paket-paket pengadaan barang dan jasa. Persiapan aktivitas tersebut jika dilakukan secara transparan akan menutup peluang terjadinya pengelembungan anggaran akibat pada proses perencanaan yang tidak realistis serta berlebihan. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Faisal dkk (2014) yang mengemukakan bahwa untuk mencegah terjadinya tindakan fraud salah satunya dengan meningkatkan kultur organisasi khususnya pada bidang transparansi.

Terdapat beberapa praktik kecurangan yang terjadi pada tahap perencanaan akibat dari aktivitas yang tidak transparan serta mengabaikan prinsip-prinsip reformasi birokrasi seperti halnya rekayasa untuk pemaketan KKN, pengadaan yang diarahkan, pengelembungan harga dan penentuan jadwal pengadaan yang tidak realistis. Pencegahan terhadap bentuk-bentuk kecurangan tersebut dapat dilakukan dengan beberapa teknik salah satunya yaitu dengan menerapkan konsep transparansi dan meningkatkan sistem pengawasan pada setiap proses aktivitas perencanaan.

Bentuk intrerpretasi dari pengaruh positif antara proses pada tahap perencanaan dengan pencegahan fraud procurement antara lain dengan melakukan penyusunan spesifikasi teknis serta kriteria pengadaan untuk perlu dilakukan pengkajian melalui pengendalian internal yang ketat dan pengawasan dari masyarakat sehingga dapat mencegah terjadinya tahap perencanaan yang diarahkan yang dapat memberi keuntungan bagi pihak tertentu. Pencegahan melalui pengendalian internal dan pengawasan dari masyarakat tersebut perlu diperkuat oleh sebuah aturan untuk menyempurnakan teknik pencegahan pengadaan khususnya pada tahap perencanaan.

Penyusunan spesifikasi teknis dan kriteria dilakukan dengan transparan dan realistis sesuai dengan kebutuhan. Penyusunan yang dilakukan dengan mengedepankan semangat reformasi birokrasi untuk dapat mencegah pengelembungan dana/anggaran. Pengelembungan anggaran dapat terjadi pada beberapa bidang antara lain kuantitas, kualitas serta ketepatan waktu. Apabila proses penyusunan spesifikasi teknis dan kriteria dilaksanakan dengan terbuka serta hasil spesifikasi pengadaan dapat diketahui oleh semua masyarakat maka

kecenderungan terjadinya penggelembungan akan semakin rendah atau terbatas. Persiapan target serta ketepatan waktu pengadaan diperlukan dengan akuntabel dan transparan untuk mencegah terjadinya penunjukan langsung.

Penunjukan langsung dapat terjadi pada waktu pelaksanaan yang ditunda-tunda. Kecurangan tersebut dapat dicegah melalui proses transparansi dengan menupload semua informasi penting terkait dengan waktu dan target pengadaan melalui *E-Procurement*. Temuan pada penelitian ini sejalan dengan penelitian Faisal dkk (2014), Nugroho (2015) dan Messah dkk (2013) yang menjelaskan bahwa responden setuju bahkan sangat setuju dengan adanya *E-Procurement* untuk mengurangi adanya indikasi kecurangan pada setiap tahapan pengadaan barang/ jasa.

2. Pengaruh *E-Procurement* (X) terhadap *Good Governance* (Y₂)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh langsung antara *E-Procurement* (X) berpengaruh terhadap *good governance* (Y₂). Hal ini dapat dibuktikan dengan dengan besarnya koefisien path sebesar 0,991 dengan nilai sig t sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$) maka secara parsial variabel *E-Procurement* (X) berpengaruh terhadap *good governance* (Y₂). Setelah sistem *E-Procurement* mulai diterapkan di berbagai daerah pada seluruh pemerintah daerah maka hal inilah yang menjadi perhatian pemerintah daerah untuk dapat selalu menjalankan dan mengelola dengan baik berjalannya sistem *E-Procurement*. Hal ini diperlukan karena suatu sistem yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan sistem itu berlain fungsi dan tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan, yang merujuk pada tentangan yang ada maka pemerintah daerah diharuskan siap dengan kondisi yang ada pada saat sekarang ini.

Secara umum bisa dilihat bahwa tantangan utama adalah kemampuan sumber daya untuk dapat memaksimalkan kemampuannya dalam mengelola dan menjaga sistem *E-Procurement* yang telah diterapkan. Keamanan yang menjadi permasalahan akan menjadi gangguan yang mencoba untuk menerobos sistem untuk mencapai tujuan buruk yang telah direncanakan, hal ini merupakan masalah yang dihadapi instansi yang telah menggunakan teknologi yang sudah bisa diakses secara online. Sistem yang bagus harus diikuti dengan fasilitas yang maksimal yang dapat mendukung berjalannya suatu sistem itu dengan baik seperti membentuk panitia pengadaan yang kompeten, menetapkan sistem penilaian kerja serta menetapkan prosedur standar operasional. Dalam hal ini *E-Procurement* tidak hanya memberikan efisiensi pemerintahan akan tetapi juga terkait pada transparansi anggaran dalam hal pengadaan barang dan jasa. Pentingnya transparansi dalam aspek pengelolaan anggaran ini didasari oleh banyaknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) (Novitaningrum, 2014)

Penerapan *E-Procurement* yang semakin baik maka *good governance* juga akan semakin baik. Penerapan *E-Procurement* harus dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan tujuan pengadaan yaitu kualitas, kuantitas dan ketepatan waktu, selain itu keberhasilan pemerintahan yang baik dalam penerapan *E-Procurement* juga didorong bebrapa faktor diantaranya adanya komitmen dan konsistensi yang tinggi dari pimpinan daerah dalam menerapkan program-program inovatif, dasar hukum yang kuat serta ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung. Hasil pada penelitian ini sejalan dengan Astari dkk (2020), Adiana dkk (2018), Maharani dan Hamzah (2008) dengan hasil

penelitian bahwa prinsip efisiensi, Efektivitas, transparansi, ketepatan waktu, kualitas berpengaruh signifikan terhadap *good governance*. Pada pemerintah kabupaten Lamongan dapat dijelaskan bahwa penerapan *E-Procurement* semakin baik akan berpengaruh positif dengan terwujudnya *good governance*.

3. Pengaruh *Fraud* (Y_1) terhadap *Good Governance* (Y_2)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh langsung antara *Fraud* (Y_1) terhadap *Good Governance* (Y_2). Hal ini dapat dibuktikan dengan besarnya koefisien path sebesar 0,063 dengan nilai sig t sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$) maka secara parsial variabel *fraud* (Y_1) berpengaruh terhadap *good governance* (Y_2). Secara umum istilah *fraud* didefinisikan sebagai kecurangan. Berdasarkan *fraud tree* terdapat tiga kelompok besar *fraud* yaitu: korupsi, penyalahgunaan *asset* dan laporan yang dimanipulasi. *Fraud* dapat terjadi apabila dipenuhi 3 unsur dalam fraud triangle yaitu adanya peluang, motif dan rasionalisasi.

Implementasi *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk memenuhi aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan *good governance* adalah sebagai pelayan publik. Implementasi *good governance* merupakan gagasan gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah dan masyarakat sehingga terjadi penyelenggaraan pemerintah yang bersih, demokratis dan efektif sesuai dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat yang makmur. Berdasarkan fraud triangle dimana anggota organisasi akan merasionalisasi sebuah tindakan yang diambilnya yaitu suatu kecurangan akuntansi yang mana anggota organisasi

tersebut memiliki jabatan dan pengaruh terhadap suatu organisasi sehingga kecurangan yang dilakukan dianggap wajar.

Semakin rendah implementasi *fraud* maka *good governance* akan semakin meningkat. Hasil pada penelitian ini sejalan dengan Anugerah (2014) dan Wilopo 2006 yang dalam penelitiannya menunjukkan terjadinya *fraud* karena tidak berjalannya mekanisme *good governance*. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kecenderungan kecurangan agar tercipta *good governance* adalah dengan melakukan prinsip-prinsip secara optimal seperti adanya transparansi dimana karakteristik *good governance* adalah keterbukaan yang mana keterbukaan itu mencakup semua aspek aktifitas yang menyangkut kepentingan publik dari proses pengambilan keputusan, penggunaan dana- dana publik sampai pada tahapan evaluasi. Akuntabilitas yang mana merupakan pertanggungjawaban kepada publik serta partisipasi yang mana melakukan pembentukan panitia yang kompeten.

4. Pengaruh *E-Procurement* (X) terhadap *Good Governance* (Y₂) Melalui *Fraud* (Y₁)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh *E-Procurement* (X) terhadap *good governance* (Y₂) melalui *Fraud* (Y₁). menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel *fraud* memiliki t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu 0,00435 maka dapat disimpulkan bahwa koefisien mediasi tidak signifikan yang berarti tidak terdapat pengaruh mediasi.

Penerapan prinsip *good governance* dalam pengadaan elektronik dapat mencegah terjadinya *fraud* dengan menerapkan prinsip partisipasi, transparan, responsive, efektif, *equity*, tujuan strategis, akuntabilitas dan nilai budaya lokal

dan faktor pengendaliannya adalah pencegahan korupsi, penegakan hukum dan pengawasan. Konsep yang perlu dibangun dalam pengadaan elektronik untuk mewujudkan *good governance* menurut Santi dan Ari (2016) yaitu prinsip partisipasi yakni seluruh pengadaan barang dan jasa melalui internet meningkatkan semua partisipasi karena memberikan peluang bagi semua lapisan masyarakat untuk mengakses dimanapun dan kapanpun. Prinsip transparansi adanya standar baku yang memudahkan para penyedia untuk mengetahui adanya lelang serta prinsip akuntabilitas yang merupakan pertanggungjawaban yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat yang memperlihatkan seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa.

Adanya prinsip-prinsip *good governance* menjadikan *e procurement* sangat tepat untuk digunakan dalam pengadaan elektronik untuk mencegah terjadinya *fraud*, namun hasil penelitian ini menunjukkan tidak dapatnya *fraud* memediasi pengaruh *e procurement* terhadap *good governance* yang mana penelitian ini sejalan dengan pendapat Azmi (2016) bahwa pengadaan elektronik hanya alat untuk memoderenisasikan penipuan jika tidak adanya akuntabilitas dan transparansi. Transparansi layanan pemerintah akan menurunkan persepsi terjadinya korupsi, namun penerapannya *E-Procurement* belum sepenuhnya maksimal, terdapat beberapa faktor yang belum dilaksanakan secara maksimal seperti perlunya tambahan tenaga kerja yang terampil mengoperasikan *E-Procurement*, peningkatan infrastruktur serta adanya dukungan penuh dari lembaga yang terkait.

Tidak maksimalnya pelaksanaan penerapan *E-procurement* akan menimbulkan gap antara desain yang telah direncanakan dengan hasil yang

ingin dicapai, hal ini menjadikan korupsi pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu yang paling banyak terjadi.

4.6 Implikasi Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian dan analisis yang peneliti olah dengan menggunakan alat bantuan program SPSS 24 for windows maka peneliti dapat menginterpretasikan hasil sebagai berikut:

1. Dari uji validitas dapat diketahui bahwa untuk masing-masing soal pada tiap indikator variabel bebas dan terikat nilai sig (2-tailed) $< p = 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini valid.
2. Dari uji reliabilitas nilai alpha variabel bebasnya yaitu *E-Procurement*, variabel mediasi yaitu *fraud* dan variabel terikatnya *good governance* lebih besar dari 0,60 dengan tingkat signifikansi alpha = 5% sehingga dapat disimpulkan bahwa instrument dalam variabel bebas dan terikatnya reliabel.
3. Dari uji koefisien determinasi di dapatkan kesimpulan bahwa pengaruh variabel bebas sebesar 97,5 % disebabkan oleh variabel *E-Procurement* (X_1) dan *fraud* (Y_1) sedangkan sisanya sebesar 2,5% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar variabel tersebut.
4. Dari hasil uji t, variabel E-procurement diperoleh nilai t hitung sebesar 3,369 dan 100,5 dan variabel fraud mempunyai nilai t hitung 4,460 yang menunjukkan bahwa variabel bebas, variabel mediasi dan variabel terikat mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan.
5. Pada hasil penelitian memperlihatkan jika *E-procurement* pada *good governance* yang dimediasi oleh *fraud* tidak memiliki pengaruh. Hal ini

menunjukkan bahwa *fraud* dapat terjadi karena tidak berjalannya mekanisme good governance untuk mencegah atau mengurangi fraud.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui tahap pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. *E-Procurement* berpengaruh terhadap *fraud*. Sehingga penelitian ini menerima hipotesis satu (H_1) yang telah diajukan.
2. *E-Procurement* berpengaruh terhadap *good governance*. Sehingga penelitian ini menerima hipotesis dua (H_2) yang telah diajukan.
3. *Fraud* berpengaruh terhadap *good governance*. Sehingga penelitian ini menerima hipotesis tiga (H_3) yang telah diajukan.
4. *Fraud* tidak mampu memediasi hubungan antara *E-Procurement* terhadap *good governance*. Sehingga penelitian ini menolak hipotesis empat (H_4) yang telah diajukan.

5.2 Saran

Penulis menyadari masih terdapat keterbatasan yang muncul dalam pelaksanaan penelitian. Oleh karena itu hasil penelitian ini belum dapat dikatakan sempurna, namun dengan adanya penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada semua pihak khususnya pada bidang manajemen.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat hal yang harus dilakukan lebih lanjut diantaranya:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan maupun pengguna E-Procurement

a. Meningkatkan kapasitas dan sumber daya manusia

Masih minimnya tenaga terampil yang mampu mengoperasikan sistem *E-Procurement* membuat tidak semua pemerintah daerah mampu mengimplentasikannya dengan baik. Dalam penerapan *E-Procurement*, berpotensi untuk mengurangi tindakan korupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, pegawai yang menjalankan sistem *E-Procurement* tersebut harus benar-benar berkomitmen tinggi serta akuntabel agar tidak terdapat manipulasi data.

b. Mendukung pendanaan dan mewujudkan sistem *E-Procurement*

Pendanaan yang nantinya digunakan bagi perbaikan maupun memenuhi kebutuhan komponen apa saja yang diperlukan dalam upaya mendukung sistem *E-Procurement* yang efektif dan efisien.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang dapat berpengaruh kepada *good governance*, karena terdapat banyak faktor yang mempengaruhi *good governance* dan untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan observasi yang lebih banyak sehingga menghasilkan signifikansi hasil statistik yang lebih baik dan dapat menggunakan *software* PLS SEM dalam pengujian data.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiana, I. made budi, & Yasa, I. N. M. (2018). Pengaruh Electronic Procurement Terhadap Good Governance Pada Pemerintah Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 5, 1465.
<https://doi.org/10.24843/eeb.2018.v07.i05.p09>.
- Anugerah, R. (2014). Peran Good Corporate Governance dalam Pencegahan Fraud. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 3(1), 101–113.
- Azmi, Khairul Saidah Abas dkk. 2016. e-Procurement: Alat untuk Mengurangi Penipuan Pengadaan Publik di Malaysia? Academic Conferences & Publising International Ltd.
- Diah Astari, L., Dalatululum, M., Kurniasih, N., Devi Indahsari, N., & Kurniasih, Y. (2020). Analisis Penerapan E-Procurement Sebagai Efisiensi Pemerintahan Kota Surabaya. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)*, Mei 2020, Vol. 4 No. 1(1), 66–76.
- Dwiyanto, Agus dkk. 2012. Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Faisol, I. A., Tarjo, & Musyarofah, S. (2014). Pengaruh Penerapan E-Procurement Terhadap Pencegahan Fraud Di Sektor Publik. *JAFFA Oktober*, 02(2), 71–90.
- Novitaningrum, Badzlina Daroyani. Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Electronic Procurement (Best Practice di Pemerintah Kota Surabaya), Universitas Airlangga. 2014.
- Nugroho, R. (2015). Pengaruh Implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) Terhadap Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan). *None*, 3(11),

1905–1911.

Maharani, R. & Hamzah, A. 2008. Pengaruh E-Procurement terhadap terwujudnya Good Governance. *Jurnal Infestasi*, Vol 4, No.1, Juni 2008, Hal. 1-13.

Messah, Yunita A. dkk. 2013. Kajian Persepsi Pelaku Jasa Konstruksi tentang Kegiatan Pengadaan Jasa konstruksi secara e-procurement di Kota Kupang. *Jurnal Teknik Sipil*, Vol. II. No. 1, April 2013.

Santi & Ari. 2016. Studi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berbasis Elektronik Dalam Mewujudkan Good Governance di Kabupaten Trenggalek. *Journal of public policy and Management Review*. Vol 5. Nomor 2.

Lampiran 1. Kuesioner

KUESIONER

PENGARUH IMPLEMENTASI E-PROCUREMENT TERHADAP *FRAUD* PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GONVERNANCE*

(Studi pada Pemkab Lamongan)

Sehubungan dengan penyusunan skripsi dengan judul yang telah disebutkan diatas,
maka dengan Hormat saya :

Nama : Wiwik Amelia

Nim : 1701011571

Memohon kesediaan Saudara/i untuk mengisi kuesioner (daftar pertanyaan) yang saya ajukan ini secara jujur dan terbuka. Daftar pertanyaan ini saya ajukan semata-mata untuk keperluan penelitian sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang Strata satu (S1), Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan. Sehubungan hal tersebut, maka kebenaran dan kelengkapan jawaban yang Saudara/i berikan akan sangat membantu bagi penulis, dan selanjutnya akan menjadi masukan yang bermanfaat bagi hasil penelitian yang penulis lakukan.

Atas partisipasi Saudara/i dalam mengisi daftar pertanyaan atau kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya

Wiwik Amelia

KUESIONER

PENGARUH IMPLEMENTASI E-PROCUREMENT TERHADAP *FRAUD*

PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM MEWUJUDKAN

GOOD GONVERNANCE

(Studi pada Pemkab Lamongan)

Petunjuk pengisian kuesioner :

1. Isilah data diri anda sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada identitas responden.
2. Pilih salah satu jawaban yang tersedia sesuai dengan pengalaman yang anda dapatkan sebagai Penyedia/Peserta Tender pada Pemkab Lamongan pada komponen-komponen variabel. Masing-masing jawaban sebagai berikut :

No.	Kriteria Jawaban	Kode	Nilai/Skor Jawaban
1.	Sangat Setuju	SS	5
2	Setuju	S	4
3	Kurang Setuju	KS	3
4	Tidak Setuju	TS	2
5	Sangat Tidak Setuju	STS	1

3. Diharapkan untuk tidak menjawab lebih dari satu pilihan jawaban.

4. IDENTITAS RESPONDEN :

- a. Nama Responden :
- b. Jenis Kelamin : Pria Wanita
- c. Usia : 24-29 Tahun
 30-45 Tahun
 >46 Tahun
- d. Lama Berdiri : < 1 Tahun
 1 Tahun – 5 Tahun
 > 5 Tahun

- e. Omset Tahunan : < Rp. 10.000.000
 Rp. 10.000.000 s/d Rp. 25.000.000
 > Rp. 25.000.000

Daftar Pertanyaan Variabel E-Procurement (X)

Variabel	Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
	Kuantitas					
	1. Menggunakan E-procurement dapat menghemat biaya pengadaan					
	2. Penyedia tidak perlu stok barang terlalu banyak					
	3. Implementasi e-procurement memudahkan dalam perencanaan dan pengendalian pengadaan barang dan jasa					
	Kualitas					
E - Procurement	1. Mempererat hubungan dengan supplier					
	2. Meningkatkan kepuasan user					
	3. Mengurangi biaya transaksi karena mengurangi penggunaan telfon, fax dan dokumen-dokumen yang menggunakan kertas					
	Ketepatan Waktu					
	1. Mengurangi waktu pemesanan barang					
	2. Meningkatkan efisiensi dalam proses pengadaan proses aplikasi yang lebih cepat					
	3. Penyedia tepat waktu dalam memasukkan dokumen-dokumen					

Daftar Pertanyaan Variabel Fraud (Y1)

Variabel	Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
	Corruption (korupsi)					
	1. Prosedur pelayanan yang ditetapkan sudah memadai dan tidak berpotensi menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)					
	2. Adanya petugas pelayanan yang bertindak diskriminatif					
	3. Petugas pelayanan tidak memberikan pelayanan di luar prosedur yang telah ditetapkan dengan imbalan uang/barang					
Fraud	Asset Misappropriation (penyalahgunaan aset)					
	1. Dengan adanya pengawasan dapat membantu mengatasi tindakan kecurangan yang dilakukan pegawai					
	2. Hanya pihak internal yang mengerti lika-liku pembuatan laporan keuangan					
	3. Hanya pihak internal yang mengetahui dan memahami isi dan angka laporan keuangan yang selesai dikerjakan					
	Fradulent Statement (laporan yang dimanipulasi)					
	1. Adanya suatu tujuan tertentu, biaya dicatat lebih besar dari semestinya					
	2. Suatu masalah apabila pencatatan bukti transaksi dilakukan tanpa otorisasi dari pihak yang berwenang					
	3. Tidak menjadi suatu masalah apabila suatu transaksi tidak memiliki bukti pendukung ganda					

Daftar Pertanyaan Variabel Good Governance (Y2)

Variabel	Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
	Transparansi					
	1. Pemerintah sudah menyelenggarakan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik).					
	2. Tidak adanya keterbukaan pemerintah kabupaten akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.					
	3. Laporan akuntabilitas telah dipublikasikan secara bebas dapat diakses oleh masyarakat luas.					
	4. Informasi yang tersedia dapat dimengerti merupakan perwujudan nyata dari transparansi pemerintah.					
Good Governance	Partisipasi					
	1. Upaya membentuk panitia pengadaan yang kompeten					
	2. Data dan informasi pengadaan barang dan jasa dapat diperoleh oleh peserta tersebut demi kepentingan bersama					
	3. Dalam menyusun pengadaan dan tahapan dilakukan secara tertib, aman, dan terbuka					
	Akuntabilitas					
	1. Upaya membentuk komite audit					
	2. Upaya membentuk dan menetapkan kembali peran dan fungsi auditor internal terkait pengadaan barang dan jasa					
	3. Upaya menetapkan sistem penilaian kerja pengadaan terkait pengadaan barang dan jasa					

	Koordinasi					
	1. Memiliki kesamaan dalam mewujudkan visi dan misi pada pengadaan barang dan jasa					
	2. Upaya menetapkan prosedur standar operasional pengadaan secara bersama					
	3. Memiliki pandangan yang sama dalam menetapkan kebijakan					

Lampiran 2. Tabulasi Jawaban Responden

No	Butir Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Sig.	Keterangan
1	X				
	X1.1	0,956	0,113	0,000	Valid
	X1.2	0,956	0,113	0,000	Valid
	X1.3	0,356	0,113	0,000	Valid
	X1.4	0,956	0,113	0,000	Valid
	X1.5	0,956	0,113	0,000	Valid
	X1.6	0,180	0,113	0,000	Valid
	X1.7	0,956	0,113	0,000	Valid
	X1.8	0,956	0,113	0,000	Valid
	X1.9	0,356	0,113	0,000	Valid
2	Y1				
	Y1.1	0,169	0,113	0,000	Valid
	Y1.2	0,866	0,113	0,000	Valid
	Y1.3	0,255	0,113	0,000	Valid
	Y1.4	0,234	0,113	0,000	Valid
	Y1.5	0,154	0,113	0,000	Valid
	Y1.6	0,866	0,113	0,000	Valid
	Y1.7	0,291	0,113	0,000	Valid
	Y1.8	0,866	0,113	0,000	Valid
	Y1.9	0,866	0,113	0,000	Valid
3	Y2				
	Y2.1	0,164	0,113	0,000	Valid
	Y2.2	0,194	0,113	0,000	Valid
	Y2.3	0,938	0,113	0,000	Valid
	Y2.4	0,938	0,113	0,000	Valid
	Y2.5	0,362	0,113	0,000	Valid
	Y2.6	0,938	0,113	0,000	Valid
	Y2.7	0,938	0,113	0,000	Valid
	Y2.8	0,362	0,113	0,000	Valid
	Y2.9	0,938	0,113	0,000	Valid
	Y2.10	0,938	0,113	0,000	Valid

Item	Cronbach Alpha	Alpha	Keterangan
E-Procurement (X)	0,901	0,60	Reliabel

Fraud (Y1)	0,631	0,60	Reliabel
Good Governance (Y2)	0,886	0,60	Reliabel

Variabel	Tolerance Value	VIF	Keterangan
E-Procurement (X)	0.960	1.041	Nonmultikolinearitas
Fraud (Y1)	0.960	1.041	Nonmultikolinearitas

Indikator	Item Pernyataan	Jawaban Responden					Mean Item	Mean Indikator
		SS	S	KS	TS	STS		
Kuantitas (X1.1)	Menggunakan E-procurement dapat menghemat biaya pengadaan	98	89	89	0	0	4.03	4.21
	Penyedia tidak perlu stok barang terlalu banyak	98	89	89	0	0	4.03	
	Implementasi e-procurement memudahkan dalam perencanaan dan pengendalian pengadaan barang dan jasa	182	69	25	0	0	4.57	
Kualitas (X1.2)	Mempererat hubungan dengan supplier	98	89	89	0	0	4.03	3.71
	Meningkatkan kepuasan user	98	89	89	0	0	4.03	
	Mengurangi biaya transaksi karena mengurangi penggunaan telfon, fax dan dokumen-dokumen yang menggunakan kertas	34	16	164	62	0	3.08	
Ketepatan Waktu (X1.3)	Mengurangi waktu pemesanan barang	98	89	89	0	0	4.03	4.21
	Meningkatkan efisiensi dalam proses pengadaan proses aplikasi yang lebih cepat	98	89	89	0	0	4.03	
	Penyedia tepat waktu dalam memasukkan dokumen-dokumen	182	69	25	0	0	4.57	

Indikator	Item Pernyataan	Jawaban Responden					Mean Item	Mean Indikator
		SS	S	KS	TS	STS		
Korupsi (Y1.1)	Prosedur pelayanan yang ditetapkan sudah memadai dan tidak berpotensi menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)	35	16	164	61	0	3.09	3.77
	Adanya petugas pelayanan yang bertindak diskriminatif	95	92	89	0	0	4.02	
	Petugas pelayanan tidak memberikan pelayanan di luar prosedur yang telah ditetapkan dengan imbalan uang/barang	107	139	17	3	10	4.20	

Penyalahgunaan Asset (Y1.2)	Dengan adanya pengawasan dapat membantu mengatasi tindakan kecurangan yang dilakukan pegawai	34	16	164	62	0	3.08	3.71
	Hanya pihak internal yang mengerti lika-liku pembuatan laporan keuangan	98	89	89	0	0	4.03	
	Hanya pihak internal yang mengetahui dan memahami isi dan angka laporan keuangan yang selesai dikerjakan	95	92	89	0	0	4.02	
Laporan yang Dimanipulasi (Y1.3)	Adanya suatu tujuan tertentu, biaya dicatat lebih besar dari semestinya	183	66	27	0	0	4.57	4.2
	Suatu masalah apabila pencatatan bukti transaksi dilakukan tanpa otorisasi dari pihak yang berwenang	95	92	89	0	0	4.02	
	Tidak menjadi suatu masalah apabila suatu transaksi tidak memiliki bukti pendukung ganda	95	92	89	0	0	4.02	

Indikator	Item Pernyataan	Jawaban Responden					Mean Item	Mean Indikator
		SS	S	KS	TS	STS		
Transparansi (Y2.1)	Pemerintah sudah menyelenggarakan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik).	107	139	17	3	10	4.20	3.83
	Tidak adanya keterbukaan pemerintah kabupaten akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.	34	16	164	62	0	3.08	
	Laporan akuntabilitas telah dipublikasikan secara bebas dapat diakses oleh masyarakat luas.	98	89	89	0	0	4.03	
	Informasi yang tersedia dapat dimengerti merupakan perwujudan nyata dari transparansi pemerintah.	98	89	89	0	0	4.03	
Partisipasi (Y2.2)	Upaya membentuk panitia pengadaan yang kompeten	182	69	25	0	0	4.57	4.21
	Data dan informasi pengadaan barang dan jasa dapat diperoleh oleh peserta tersebut demi kepentingan bersama	98	89	89	0	0	4.03	
	Dalam menyusun pengadaan dan tahapan dilakukan secara tertib, aman, dan terbuka	98	89	89	0	0	4.03	
Akuntabilitas (Y2.3)	Upaya membentuk komite audit	182	69	25	0	0	4.57	4.21
	Upaya membentuk dan menetapkan kembali peran dan fungsi auditor internal terkait pengadaan barang dan jasa	98	89	89	0	0	4.03	

Upaya menetapkan sistem penilaian kerja pengadaan terkait pengadaan barang dan jasa	98	89	89	0	0	4.03
---	----	----	----	---	---	------

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
Laki-laki	173	63
Perempuan	103	37
jumlah	276	100

Usia	Jumlah Responden	Persentase
24-29	164	59
30-45	112	41
jumlah	276	100

Lama Usaha	Jumlah Responden	Persentase
1-5 Tahun	144	52
> 5 Tahun	132	48
jumlah	276	100

Omset Tahunan	Jumlah Responden	Persentase
<10 juta- 25 juta	144	52
> 25 juta	132	48
jumlah	276	100

RESPONDEN	X1 E- PROCUREMENT									SKOR TOTAL X1
	KUANTITAS			KUALITAS			KETEPATAN WAKTU			
	x1.1	x1.2	x1.3	x1.4	x1.5	x1.6	x1.7	x1.8	x1.9	
1	4	4	3	4	4	3	4	4	3	33
1	4	4	5	4	4	3	4	4	5	37
1	3	3	5	3	3	2	3	3	5	30
1	5	5	5	5	5	3	5	5	5	43
1	3	3	4	3	3	3	3	3	4	29
1	5	5	5	5	5	2	5	5	5	42
1	4	4	4	4	4	3	4	4	4	35
1	4	4	5	4	4	3	4	4	5	37
1	3	3	5	3	3	2	3	3	5	30

1	5	5	5	5	5	3	5	5	5	43
1	5	5	5	5	5	3	5	5	5	43
1	5	5	4	5	5	3	5	5	4	41
1	3	3	5	3	3	2	3	3	5	30
1	4	4	3	4	4	3	4	4	3	33
1	4	4	5	4	4	3	4	4	5	37
1	3	3	5	3	3	2	3	3	5	30
1	5	5	5	5	5	3	5	5	5	43
1	3	3	4	3	3	3	3	3	4	29
1	5	5	5	5	5	2	5	5	5	42
1	4	4	3	4	4	3	4	4	3	33
1	4	4	5	4	4	3	4	4	5	37
1	3	3	5	3	3	3	3	3	5	31
1	5	5	5	5	5	3	5	5	5	43
1	3	3	4	3	3	2	3	3	4	28
1	5	5	5	5	5	3	5	5	5	43
1	5	5	5	5	5	3	5	5	5	43
1	3	3	5	3	3	3	3	3	5	31
1	4	4	4	4	4	2	4	4	4	34
1	5	5	4	5	5	3	5	5	4	41
1	4	4	4	4	4	3	4	4	4	35
1	4	4	5	4	4	2	4	4	5	36
1	3	3	5	3	3	3	3	3	5	31
1	5	5	5	5	5	3	5	5	5	43
1	5	5	5	5	5	2	5	5	5	42
1	5	5	4	5	5	3	5	5	4	41
1	3	3	5	3	3	3	3	3	5	31
1	4	4	3	4	4	4	4	4	3	34
1	4	4	5	4	4	5	4	4	5	39
1	3	3	5	3	3	3	3	3	5	31
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
1	3	3	4	3	3	5	3	3	4	31
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
1	3	3	4	3	3	4	3	3	4	30
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
1	4	4	3	4	4	5	4	4	3	35
1	4	4	5	4	4	5	4	4	5	39
1	3	3	5	3	3	4	3	3	5	32
1	5	5	5	5	5	4	5	5	5	44
1	3	3	4	3	3	4	3	3	4	30
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
1	5	5	5	5	5	3	5	5	5	43
1	3	3	5	3	3	5	3	3	5	33
1	4	4	4	4	4	3	4	4	4	35
1	5	5	4	5	5	3	5	5	4	41
1	4	4	4	4	4	2	4	4	4	34
1	4	4	5	4	4	3	4	4	5	37
1	4	4	3	4	4	3	4	4	3	33
1	4	4	5	4	4	2	4	4	5	36
1	3	3	5	3	3	3	3	3	5	31

1	5	5	5	5	5	3	5	5	5	43
1	3	3	4	3	3	2	3	3	4	28
1	5	5	5	5	5	3	5	5	5	43
1	4	4	4	4	4	3	4	4	4	35
1	4	4	5	4	4	3	4	4	5	37
1	3	3	5	3	3	3	3	3	5	31
1	5	5	5	5	5	2	5	5	5	42
1	5	5	5	5	5	3	5	5	5	43
1	5	5	4	5	5	3	5	5	4	41
1	3	3	5	3	3	3	3	3	5	31
1	4	4	3	4	4	2	4	4	3	32
1	4	4	5	4	4	3	4	4	5	37
1	3	3	5	3	3	3	3	3	5	31
1	5	5	5	5	5	2	5	5	5	42
1	5	5	4	5	5	3	5	5	4	41
1	3	3	5	3	3	3	3	3	5	31
1	4	4	3	4	4	2	4	4	3	32
1	4	4	5	4	4	3	4	4	5	37
1	3	3	5	3	3	3	3	3	5	31
1	5	5	5	5	5	4	5	5	5	44
1	3	3	4	3	3	5	3	3	4	31
1	5	5	5	5	5	3	5	5	5	43
1	4	4	3	4	4	5	4	4	3	35
1	4	4	5	4	4	5	4	4	5	39
1	3	3	5	3	3	5	3	3	5	33
1	5	5	5	5	5	4	5	5	5	44
1	3	3	4	3	3	5	3	3	4	31
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
1	5	5	5	5	5	4	5	5	5	44
1	3	3	5	3	3	5	3	3	5	33
1	4	4	4	4	4	5	4	4	4	37
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
1	3	3	4	3	3	4	3	3	4	30
1	5	5	5	5	5	4	5	5	5	44
1	4	4	3	4	4	4	4	4	3	34
1	4	4	5	4	4	5	4	4	5	39
1	3	3	5	3	3	3	3	3	5	31
1	4	4	5	4	4	5	4	4	5	39
1	3	3	5	3	3	3	3	3	5	31
1	5	5	5	5	5	3	5	5	5	43
1	3	3	4	3	3	2	3	3	4	28
1	5	5	5	5	5	3	5	5	5	43
1	4	4	4	4	4	3	4	4	4	35
1	4	4	5	4	4	2	4	4	5	36
1	3	3	5	3	3	3	3	3	5	31
1	5	5	5	5	5	3	5	5	5	43
1	5	5	5	5	5	2	5	5	5	42
1	5	5	4	5	5	3	5	5	4	41
1	3	3	5	3	3	3	3	3	5	31
1	4	4	3	4	4	2	4	4	3	32

1	3	3	5	3	3	5	3	3	5	33
1	4	4	4	4	4	3	4	4	4	35
1	5	5	4	5	5	3	5	5	4	41
1	4	4	4	4	4	2	4	4	4	34
1	4	4	5	4	4	3	4	4	5	37
1	3	3	5	3	3	3	3	3	5	31
1	5	5	5	5	5	2	5	5	5	42
1	5	5	5	5	5	3	5	5	5	43
1	5	5	4	5	5	3	5	5	4	41
1	3	3	5	3	3	2	3	3	5	30
1	4	4	3	4	4	3	4	4	3	33
1	4	4	5	4	4	3	4	4	5	37
1	3	3	5	3	3	3	3	3	5	31
1	5	5	5	5	5	2	5	5	5	42
2	3	3	4	3	3	3	3	3	4	29
2	5	5	5	5	5	3	5	5	5	43
2	4	4	4	4	4	2	4	4	4	34
2	4	4	5	4	4	3	4	4	5	37
2	3	3	5	3	3	3	3	3	5	31
2	5	5	5	5	5	2	5	5	5	42
2	5	5	5	5	5	3	5	5	5	43
2	5	5	4	5	5	3	5	5	4	41
2	3	3	5	3	3	3	3	3	5	31
2	4	4	3	4	4	3	4	4	3	33
2	4	4	5	4	4	2	4	4	5	36
2	3	3	5	3	3	3	3	3	5	31
2	5	5	5	5	5	3	5	5	5	43
2	5	5	4	5	5	3	5	5	4	41
2	3	3	5	3	3	2	3	3	5	30
2	4	4	3	4	4	3	4	4	3	33
2	4	4	5	4	4	3	4	4	5	37
2	3	3	5	3	3	2	3	3	5	30
2	5	5	5	5	5	3	5	5	5	43
2	3	3	4	3	3	3	3	3	4	29
2	5	5	5	5	5	2	5	5	5	42
2	3	3	4	3	3	3	3	3	4	29
2	5	5	5	5	5	3	5	5	5	43
2	4	4	3	4	4	4	4	4	3	34
2	4	4	5	4	4	5	4	4	5	39
2	3	3	5	3	3	3	3	3	5	31
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
2	3	3	4	3	3	5	3	3	4	31
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
2	5	5	5	5	5	4	5	5	5	44
2	3	3	5	3	3	5	3	3	5	33
2	4	4	4	4	4	3	4	4	4	35
2	5	5	4	5	5	3	5	5	4	41
2	4	4	4	4	4	2	4	4	4	34
2	4	4	5	4	4	3	4	4	5	37
2	3	3	5	3	3	3	3	3	5	31

2	5	5	5	5	5	2	5	5	5	42
2	5	5	5	5	5	3	5	5	5	43
2	5	5	4	5	5	3	5	5	4	41
2	3	3	5	3	3	2	3	3	5	30
2	4	4	3	4	4	3	4	4	3	33
2	4	4	5	4	4	3	4	4	5	37
2	3	3	5	3	3	3	3	3	5	31
2	5	5	5	5	5	2	5	5	5	42
2	3	3	4	3	3	3	3	3	4	29
2	5	5	5	5	5	3	5	5	5	43
2	4	4	4	4	4	2	4	4	4	34
2	4	4	5	4	4	3	4	4	5	37
2	3	3	5	3	3	3	3	3	5	31
2	3	3	4	3	3	2	3	3	4	28
2	5	5	5	5	5	3	5	5	5	43
2	4	4	4	4	4	3	4	4	4	35
2	4	4	5	4	4	3	4	4	5	37
2	3	3	4	3	3	3	3	3	4	29
2	5	5	5	5	5	2	5	5	5	42
2	4	4	4	4	4	3	4	4	4	35
2	4	4	5	4	4	3	4	4	5	37
2	3	3	5	3	3	3	3	3	5	31
2	5	5	5	5	5	2	5	5	5	42
2	5	5	5	5	5	3	5	5	5	43
2	5	5	4	5	5	3	5	5	4	41
2	3	3	5	3	3	2	3	3	5	30
2	4	4	3	4	4	3	4	4	3	33
2	4	4	5	4	4	3	4	4	5	37
2	3	3	5	3	3	2	3	3	5	30
2	5	5	5	5	5	3	5	5	5	43
2	3	3	4	3	3	3	3	3	4	29
2	3	3	5	3	3	4	3	3	5	32
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
2	3	3	4	3	3	3	3	3	4	29
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
2	4	4	3	4	4	5	4	4	3	35
2	4	4	5	4	4	5	4	4	5	39
2	3	3	5	3	3	4	3	3	5	32
2	4	4	3	4	4	5	4	4	3	35
2	4	4	5	4	4	3	4	4	5	37
2	3	3	5	3	3	3	3	3	5	31
2	5	5	5	5	5	2	5	5	5	42
2	3	3	4	3	3	3	3	3	4	29
2	5	5	5	5	5	3	5	5	5	43
2	4	4	4	4	4	2	4	4	4	34
2	4	4	5	4	4	3	4	4	5	37
2	3	3	5	3	3	3	3	3	5	31
2	5	5	5	5	5	2	5	5	5	42
2	5	5	5	5	5	3	5	5	5	43
2	5	5	4	5	5	3	5	5	4	41

2	3	3	5	3	3	3	3	3	5	31
2	4	4	3	4	4	2	4	4	3	32
2	4	4	5	4	4	3	4	4	5	37
2	3	3	5	3	3	3	3	3	5	31
2	5	5	5	5	5	2	5	5	5	42
2	3	3	4	3	3	3	3	3	4	29
2	5	5	5	5	5	3	5	5	5	43
2	4	4	3	4	4	2	4	4	3	32
2	4	4	5	4	4	3	4	4	5	37
2	3	3	5	3	3	3	3	3	5	31
2	5	5	5	5	5	3	5	5	5	43
2	3	3	4	3	3	3	3	3	4	29
2	4	4	5	4	4	2	4	4	5	36
2	4	4	5	4	4	3	4	4	5	37
2	3	3	5	3	3	3	3	3	5	31
2	5	5	5	5	5	2	5	5	5	42
2	3	3	4	3	3	3	3	3	4	29

Y1 FRAUD									SKOR TOTAL Y1
KORUPSI			PENYALAHGUNAAN ASET			LAPORAN YANG DIMANIPULASI			
y1.1	y1.2	y1.3	y1.4	y1.5	y1.6	y1.7	y1.8	y1.9	
3	5	1	3	4	5	5	5	5	36
5	3	3	3	4	3	5	3	3	32
3	4	3	2	3	4	4	4	4	31
3	5	3	3	5	5	4	5	5	38
2	4	3	3	3	4	4	4	4	31
3	4	1	2	5	4	5	4	4	32
3	4	1	3	4	4	3	4	4	30
2	4	2	3	4	4	5	4	4	32
3	3	3	2	3	3	5	3	3	28
3	5	3	3	5	5	5	5	5	39
2	3	1	3	5	3	4	3	3	27
3	5	3	3	5	5	5	5	5	39
3	4	3	2	3	4	4	4	4	31
3	4	3	3	4	4	5	4	4	34
3	3	3	3	4	3	5	3	3	30
2	5	1	2	3	5	5	5	5	33
3	5	1	3	5	5	5	5	5	37
3	5	3	3	3	5	4	5	5	36
3	3	3	2	5	3	5	3	3	30
2	4	1	3	4	4	3	4	4	29
3	4	3	3	4	4	5	4	4	34
3	3	1	3	3	3	5	3	3	27
2	5	3	3	5	5	5	5	5	38
3	5	1	2	3	5	4	5	5	33
3	3	2	3	5	3	5	3	3	30
2	4	2	3	5	4	3	4	4	31
3	4	3	3	3	4	5	4	4	33

3	3	3	2	4	3	5	3	3	29
4	5	1	3	5	5	5	5	5	38
5	3	3	3	4	3	4	3	3	31
3	5	5	2	4	5	5	5	5	39
5	4	5	3	3	4	3	4	4	35
5	4	4	3	5	4	5	4	4	38
5	3	4	2	5	3	5	3	3	33
2	3	4	3	5	3	5	3	3	31
3	4	5	3	3	4	3	4	4	33
3	4	5	4	4	4	5	4	4	37
3	3	5	5	4	3	5	3	3	34
2	5	4	3	3	5	5	5	5	37
3	3	4	5	5	3	4	3	3	33
3	5	4	5	3	5	5	5	5	40
2	4	5	5	5	4	4	4	4	37
3	4	5	4	3	4	5	4	4	36
3	3	4	5	5	3	5	3	3	34
2	5	4	5	4	5	5	5	5	40
3	5	4	5	4	5	5	5	5	41
3	5	5	4	3	5	4	5	5	39
3	3	5	4	5	3	5	3	3	34
3	4	4	4	3	4	3	4	4	33
2	4	4	5	5	4	5	4	4	37
3	3	4	3	5	3	5	3	3	32
3	5	5	5	3	5	5	5	5	41
3	5	5	3	4	5	4	5	5	39
2	3	5	3	5	3	5	3	3	32
3	4	4	2	4	4	3	4	4	32
3	4	4	3	4	4	5	4	4	35
2	3	4	3	4	3	5	3	3	30
3	5	5	2	4	5	5	5	5	39
3	3	5	3	3	3	4	3	3	30
2	5	4	3	5	5	5	5	5	39
3	3	4	2	3	3	4	3	3	28
3	5	4	3	5	5	5	5	5	40
4	4	5	3	4	4	3	4	4	35
5	4	5	3	4	4	5	4	4	38
3	3	4	3	3	3	5	3	3	30
5	5	4	2	5	5	5	5	5	41
5	3	4	3	5	3	4	3	3	33
5	5	5	3	5	5	5	5	5	43
4	5	5	3	3	5	5	5	5	40
5	3	4	2	4	3	5	3	3	32
3	4	4	3	4	4	4	4	4	34
3	5	4	3	3	5	4	5	5	37
2	4	5	2	5	4	4	4	4	34
3	4	5	3	5	4	5	4	4	37
3	3	4	3	3	3	5	3	3	30
2	5	4	2	4	5	5	5	5	37
3	5	4	3	4	5	5	5	5	39

3	5	5	3	3	5	4	5	5	38
2	3	5	4	5	3	5	3	3	33
3	4	4	5	3	4	3	4	4	34
3	4	4	3	5	4	5	4	4	36
3	3	4	5	4	3	5	3	3	33
2	5	5	5	4	5	5	5	5	41
3	3	5	5	3	3	4	3	3	32
3	5	4	4	5	5	5	5	5	41
2	4	4	5	3	4	4	4	4	34
3	4	4	5	5	4	5	4	4	38
3	3	5	4	5	3	5	3	3	34
2	3	5	5	3	3	4	3	3	31
3	5	5	5	4	5	5	5	5	42
3	4	4	5	5	4	4	4	4	37
3	4	4	4	3	4	5	4	4	35
3	3	4	4	5	3	4	3	3	32
2	5	5	4	4	5	5	5	5	40
3	4	5	5	4	4	4	4	4	37
3	4	4	3	3	4	5	4	4	34
3	3	4	5	4	3	5	3	3	33
2	5	4	3	3	5	5	5	5	37
3	5	5	3	5	5	5	5	5	41
3	5	5	2	3	5	4	5	5	37
2	3	4	3	5	3	5	3	3	31
3	4	4	3	4	4	3	4	4	33
3	4	4	2	4	4	5	4	4	34
2	3	5	3	3	3	5	3	3	30
3	5	5	3	5	5	5	5	5	41
3	3	5	2	5	3	4	3	3	31
4	3	4	3	5	3	5	3	3	33
5	5	4	3	3	5	5	5	5	40
3	3	4	2	4	3	4	3	3	29
5	5	5	3	4	5	5	5	5	42
5	4	5	3	3	4	3	4	4	35
5	4	4	2	5	4	5	4	4	37
4	3	4	3	3	3	5	3	3	31
5	4	4	3	5	4	3	4	4	36
3	4	5	3	4	4	5	4	4	36
3	3	5	2	4	3	5	3	3	31
2	5	4	3	3	5	5	5	5	37
3	3	4	3	5	3	4	3	3	31
3	5	4	2	3	5	5	5	5	37
2	4	5	3	5	4	4	4	4	35
3	4	5	3	5	4	5	4	4	37
3	3	5	2	3	3	5	3	3	30
2	5	4	3	4	5	5	5	5	38
3	5	4	3	5	5	5	5	5	40
3	5	4	2	4	5	4	5	5	37
3	3	5	3	4	3	5	3	3	32
2	4	5	3	4	4	3	4	4	33

3	4	4	2	4	4	5	4	4	34
3	3	4	3	3	3	5	3	3	30
2	5	4	3	5	5	5	5	5	39
3	3	5	3	3	3	4	3	3	30
3	5	5	2	5	5	5	5	5	40
2	4	4	3	4	4	3	4	4	32
3	4	4	3	4	4	5	4	4	35
3	3	4	2	3	3	5	3	3	29
3	5	5	3	5	5	5	5	5	41
3	3	5	2	4	3	4	3	3	30
2	4	4	3	4	4	5	4	4	34
3	4	4	3	3	4	5	4	4	34
3	3	4	3	5	3	5	3	3	32
2	5	5	3	5	5	5	5	5	40
3	3	5	2	5	3	4	3	3	31
2	3	4	3	3	3	5	3	3	29
3	5	4	3	4	5	5	5	5	39
3	5	4	3	4	5	5	5	5	39
3	5	5	2	3	5	4	5	5	37
2	3	5	3	5	3	5	3	3	32
3	4	4	3	3	4	3	4	4	32
3	4	4	2	3	4	5	4	4	33
2	3	4	3	5	3	5	3	3	31
3	5	5	3	3	5	5	5	5	39
3	3	5	2	5	3	4	3	3	31
2	5	4	3	4	5	5	5	5	38
3	4	4	3	4	4	3	4	4	33
3	4	4	4	3	4	5	4	4	35
3	3	5	5	5	3	5	3	3	35
3	5	5	3	3	5	5	5	5	39
2	3	5	5	5	3	4	3	3	33
3	5	4	5	5	5	5	5	5	42
3	5	4	5	3	5	5	5	5	40
3	3	4	3	4	3	5	3	3	31
2	4	5	3	5	4	4	4	4	35
3	5	5	2	4	5	4	5	5	38
3	4	4	3	4	4	4	4	4	34
2	4	4	3	3	4	5	4	4	33
3	3	4	2	5	3	5	3	3	31
3	5	5	3	5	5	5	5	5	41
2	5	5	3	5	5	5	5	5	40
3	5	4	2	3	5	4	5	5	36
3	3	4	3	4	3	5	3	3	31
4	4	4	3	4	4	3	4	4	34
5	4	5	3	3	4	5	4	4	37
3	3	5	2	5	3	5	3	3	32
5	5	5	3	3	5	5	5	5	41
5	3	4	3	5	3	4	3	3	33
5	5	4	2	4	5	5	5	5	40
4	3	4	3	4	3	4	3	3	31

5	5	5	3	3	5	5	5	5	41
5	4	5	2	5	4	3	4	4	36
5	4	4	3	5	4	5	4	4	38
4	3	4	3	5	3	5	3	3	33
4	5	4	3	3	5	5	5	5	39
4	3	5	3	4	3	4	3	3	32
5	5	5	2	4	5	5	5	5	41
3	5	4	3	3	5	5	5	5	38
5	3	4	3	5	3	5	3	3	34
3	4	4	3	5	4	4	4	4	35
3	5	5	2	3	5	4	5	5	37
2	4	5	3	4	4	4	4	4	34
3	4	5	3	4	4	5	4	4	36
3	4	4	2	3	4	3	4	4	31
2	4	4	3	5	4	5	4	4	35
3	3	4	3	3	3	5	3	3	30
3	5	5	2	5	5	5	5	5	40
2	3	5	3	3	3	4	3	3	29
3	5	4	3	5	5	5	5	5	40
3	4	4	4	4	4	4	4	4	35
3	4	4	5	4	4	5	4	4	37
3	3	5	3	3	3	5	3	3	31
2	5	5	5	5	5	5	5	5	42
3	5	4	5	3	5	5	5	5	40
3	5	4	5	5	5	4	5	5	41
3	3	4	4	5	3	5	3	3	33
2	4	5	5	3	4	3	4	4	34
3	4	5	3	4	4	5	4	4	36
3	3	4	3	5	3	5	3	3	32
2	5	4	2	4	5	5	5	5	37
3	5	4	3	4	5	4	5	5	38
3	3	5	3	3	3	5	3	3	31
2	4	5	2	5	4	3	4	4	33
3	4	4	3	5	4	5	4	4	36
3	3	4	3	5	3	5	3	3	32
4	5	4	2	3	5	5	5	5	38
5	3	5	3	4	3	4	3	3	33
3	5	5	3	4	5	5	5	5	40
5	4	4	3	3	4	3	4	4	34
5	4	4	2	5	4	5	4	4	37
5	3	4	3	3	3	5	3	3	32
4	5	5	3	5	5	5	5	5	42
5	3	5	2	4	3	4	3	3	32
5	5	4	3	4	5	5	5	5	41
4	5	4	3	3	5	5	5	5	39
5	3	4	2	3	3	5	3	3	31
5	4	5	3	5	4	4	4	4	38
5	5	5	3	4	5	5	5	5	42
4	3	5	3	4	3	4	3	3	32
4	5	4	3	3	5	5	5	5	39

4	4	4	2	5	4	3	4	4	34
5	4	4	3	4	4	5	4	4	37
3	3	5	3	4	3	5	3	3	32
5	4	5	3	3	4	5	4	4	37
3	3	4	2	5	3	5	3	3	31
3	5	4	3	5	5	5	5	5	40
2	3	4	3	5	3	4	3	3	30
3	5	5	2	3	5	5	5	5	38
3	4	5	3	4	4	4	4	4	35
2	4	4	3	4	4	5	4	4	34
3	3	4	2	3	3	5	3	3	29
3	5	4	3	5	5	5	5	5	40
2	5	5	3	3	5	5	5	5	38
3	5	5	4	3	5	4	5	5	39
3	3	5	5	5	3	5	3	3	35
2	4	4	3	3	4	3	4	4	31
3	4	4	5	5	4	5	4	4	38
3	3	4	5	4	3	5	3	3	33
2	5	5	5	4	5	5	5	5	41
3	3	5	4	3	3	4	3	3	31
3	5	4	5	4	5	5	5	5	41
3	4	4	3	4	4	3	4	4	33
2	4	4	3	3	4	5	4	4	33
3	3	5	2	5	3	5	3	3	32
3	5	5	3	3	5	5	5	5	39
2	3	4	3	5	3	4	3	3	30
3	5	4	2	4	5	5	5	5	38
3	5	4	3	4	5	5	5	5	39
2	3	5	3	3	3	5	3	3	30
3	4	5	2	5	4	4	4	4	35
3	5	5	3	5	5	4	5	5	40
2	4	4	3	5	4	4	4	4	34
3	4	4	3	3	4	5	4	4	34
3	4	4	2	4	4	3	4	4	32
2	4	5	3	4	4	5	4	4	35
3	3	5	3	3	3	5	3	3	31
3	5	4	2	5	5	5	5	5	39
3	3	4	3	3	3	4	3	3	29
2	5	4	3	5	5	5	5	5	39
3	4	5	2	4	4	4	4	4	34
3	4	5	3	4	4	5	4	4	36
3	4	4	3	3	4	5	4	4	34
3	3	4	3	5	3	5	3	3	32
2	5	4	3	3	5	5	5	5	37
3	3	5	2	4	3	4	3	3	30
3	5	5	3	4	5	5	5	5	40
3	4	5	3	3	4	3	4	4	33
2	4	5	2	5	4	5	4	4	35
3	3	4	3	3	3	5	3	3	30

5	3	3	3	4	3	3	4	3	3	34
5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	47
4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	37
4	3	4	4	5	4	4	5	4	4	41
4	4	3	3	5	3	3	5	3	3	36
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
5	3	3	3	4	3	3	4	3	3	34
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49
4	5	3	3	5	3	3	5	3	3	37
4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	39
5	3	5	5	4	5	5	4	5	5	46
5	2	4	4	4	4	4	4	4	4	39
4	3	4	4	5	4	4	5	4	4	41
4	3	3	3	5	3	3	5	3	3	35
4	2	5	5	5	5	5	5	5	5	46
5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	48
5	3	5	5	4	5	5	4	5	5	46
4	2	3	3	5	3	3	5	3	3	34
4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	37
4	3	4	4	5	4	4	5	4	4	41
5	3	3	3	5	3	3	5	3	3	36
5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	47
5	3	3	3	4	3	3	4	3	3	34
4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	47
4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	38
4	3	4	4	5	4	4	5	4	4	41
5	3	3	3	5	3	3	5	3	3	36
5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	47
4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	47
4	3	5	5	4	5	5	4	5	5	45
4	3	3	3	5	3	3	5	3	3	35
5	3	4	4	3	4	4	3	4	4	38
5	2	4	4	5	4	4	5	4	4	41
4	3	3	3	5	3	3	5	3	3	35
4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	47
4	3	5	5	4	5	5	4	5	5	45
5	2	3	3	5	3	3	5	3	3	35
5	3	4	4	3	4	4	3	4	4	38
5	3	4	4	5	4	4	5	4	4	42
4	2	3	3	5	3	3	5	3	3	34
4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	47
4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	33
5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	47
5	3	3	3	4	3	3	4	3	3	34
4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	47
4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	38
4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	43
5	3	3	3	5	3	3	5	3	3	36
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
4	5	3	3	4	3	3	4	3	3	35

4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49
4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	48
5	5	3	3	5	3	3	5	3	3	38
5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	40
4	3	5	5	4	5	5	4	5	5	45
4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	38
4	3	4	4	5	4	4	5	4	4	41
5	3	3	3	5	3	3	5	3	3	36
5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	47
4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	47
4	3	5	5	4	5	5	4	5	5	45
4	2	3	3	5	3	3	5	3	3	34
5	3	4	4	3	4	4	3	4	4	38
5	3	4	4	5	4	4	5	4	4	42
4	3	3	3	5	3	3	5	3	3	35
4	2	5	5	5	5	5	5	5	5	46
4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	33
5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	48
5	2	4	4	4	4	4	4	4	4	39
4	3	4	4	5	4	4	5	4	4	41
4	3	3	3	5	3	3	5	3	3	35
4	2	3	3	4	3	3	4	3	3	32
5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	48
5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	40
5	3	4	4	5	4	4	5	4	4	42
4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	33
4	2	5	5	5	5	5	5	5	5	46
4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	39
5	3	4	4	5	4	4	5	4	4	42
5	3	3	3	5	3	3	5	3	3	36
4	2	5	5	5	5	5	5	5	5	46
4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	47
4	3	5	5	4	5	5	4	5	5	45
5	2	3	3	5	3	3	5	3	3	35
5	3	4	4	3	4	4	3	4	4	38
4	3	4	4	5	4	4	5	4	4	41
4	2	3	3	5	3	3	5	3	3	34
4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	47
5	3	3	3	4	3	3	4	3	3	34
5	4	3	3	5	3	3	5	3	3	37
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	33
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49
4	5	4	4	3	4	4	3	4	4	39
5	5	4	4	5	4	4	5	4	4	44
5	4	3	3	5	3	3	5	3	3	37
4	5	4	4	3	4	4	3	4	4	39
4	3	4	4	5	4	4	5	4	4	41
4	3	3	3	5	3	3	5	3	3	35
5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	47
5	3	3	3	4	3	3	4	3	3	34

RIWAYAT HIDUP

Wiwik amelia dilahirkan di Kabupaten Bojonegoro, pada tanggal 12 September 1990 merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Tamuji dan Ibu Sarmi. Menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD Tlogohaji 1 selanjutnya melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Kedungadem, lalu melanjutkan pendidikan di SMK 1 Sumberejo. Setelah lulus, melanjutkan pendidikan tinggi di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan mengambil program studi Manajemen.

Selama menjadi mahasiswa, penulis juga memiliki usaha Foto copy dan Catering yang bernama toko Dalia tepatnya di jln. Soewoko Ruko PKPRI No.5 Kel. Jetis Kec. Lamongan Kab. Lamongan.

Lamongan, Agustus 2021

Wiwik amelia